



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



KKP
2025
#RISETOGETHER

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada BPBAP Ujung Batee dalam kurun waktu Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi BPBAP Ujung Batee dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan di masa mendatang.



Aceh Besar, 17 Januari 2025

Kepala

Manijo



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Analisis Kebijakan Muda

Tim Reviu LKj Ditjen Perikanan Budi Daya

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ida Widaningsih SH

NIP.197801102002122004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	10
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	15
1. SS-1: Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat di BPBAP Ujung Batee....	15
2. SS-2: Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan	18
3. SS-3: Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.....	21



4.	SS-4: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya	33
5.	SS-5: Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan	38
6.	SS-6: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	40
3.3.	Efisiensi	66
3.4.	Kinerja Anggaran.....	67
BAB 4.	PENUTUP	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status ASN Berdasarkan Jabatan	3
Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	11
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja.....	14
Tabel 4. Nilai PNBPN yang diperoleh.....	15
Tabel 5. Sumber PNBPN yang diperoleh	17
Tabel 6. Perbandingan capaian PNBPN antar satker	17
Tabel 7. Persentase pakan mandiri yang diproduksi	18
Tabel 8. Produksi dan distribusi pakan	19
Tabel 9. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri.....	20
Tabel 10. Persentase produksi calon induk unggul	21
Tabel 11. Perbandingan capaian produksi calon induk	22
Tabel 12. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan.....	23
Tabel 13. Perbandingan capaian bantuan calon induk disalurkan	24
Tabel 14. Persentase bantuan benih yang disalurkan	25
Tabel 15. Perbandingan capaian bantuan benih disalurkan	27
Tabel 16. Sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat	28
Tabel 17. Kelompok penerima sarana produksi bioflok	30
Tabel 18. Perbandingan capaian sarana produksi bioflok yang disalurkan.....	31
Tabel 19. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan.....	32
Tabel 20. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji.....	33
Tabel 21. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan	35
Tabel 22. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji.....	35
Tabel 23. Persentase pengujian sampel antimikrobia resistan (AMR).....	36
Tabel 24. Perbandingan capaian pengujian sampel antimikrobia resistan.....	37
Tabel 25. Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan.....	38
Tabel 26. Pengujian pakan berdasarkan jenis sampel dan parameter uji.....	39
Tabel 27. Perbandingan capaian pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan.....	39



Tabel 28. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP.....	41
Tabel 29. Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA.....	44
Tabel 30. Indeks profesionalitas ASN.....	45
Tabel 31. Indeks pengelolaan kepegawaian	47
Tabel 32. Indeks pengelolaan kepegawaian unit pelaksana teknis.....	48
Tabel 33. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	49
Tabel 34. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya wilayah kerja BPAP Ujung Batee.....	51
Tabel 35. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.....	52
Tabel 36. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan	54
Tabel 37. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	56
Tabel 38. Rincian bobot IKPA.....	56
Tabel 39. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN.....	58
Tabel 40. Nilai kinerja perencanaan anggaran	60
Tabel 41. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa.....	61
Tabel 42. Nilai pengawasan kearsipan.....	63
Tabel 43. Persentase layanan perkantoran	65
Tabel 44. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2024	67
Tabel 45. Nilai aspek pembentuk IKPA tahun 2024.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPAP Ujung Batee	3
Gambar 2. Pegawai BPAP Ujung Batee berdasarkan jabatan	4
Gambar 3. Pegawai BPAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan	4
Gambar 4. Potensi Perikanan Budi Daya	5
Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi KinerjaJaku tahun 2024	13
Gambar 6. Perolehan PNBP 2019-2024.....	16
Gambar 7. Produksi pakan tahun 2019-2024.....	19
Gambar 8. Perkembangan produksi calon induk bermutu 2019-2024	21
Gambar 9. Komoditas produksi calon induk bermutu.....	22
Gambar 10. Calon induk yang disalurkan	24
Gambar 11. Perkembangan benih yang disalurkan 2019-2024	26
Gambar 12. Komoditas benih yang disalurkan.....	27
Gambar 13. Perkembangan sarana produksi Bioflok yang disalurkan 2019-2024.....	29
Gambar 14. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan tahun 2019-2024	34
Gambar 15. Persentase resistensi antibiotik	37
Gambar 16. Tangkapan layar LKE AKIP BPAP Ujung Batee	42
Gambar 17. Nilai PM SAKIP unit pelaksana teknis Ditjen PB.....	42
Gambar 18. Indeks profesionalitas ASN unit pelaksana teknis	46
Gambar 19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) unit pelaksana teknis	57
Gambar 20. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada UPT	59
Gambar 21. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada UPT	62
Gambar 22. Pengawasan kearsipan pada UPT	64
Gambar 23. Tangkapan layar aplikasi SMART nilai kinerja perencanaan anggaran.....	67
Gambar 24. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja tahun 2024	68
Gambar 25. Pagu anggaran tahun 2015-2024.....	69
Gambar 26. Tangkapan layar aplikasi SMART nilai kinerja anggaran.....	70



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan. Selain itu, sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan. Untuk wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas maka dilakukan perjanjian kinerja sebagai pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur, serta didukung sumber daya anggaran yang memadai. Alokasi anggaran tahun 2024 awalnya sebesar Rp 25.249.464.000, setelah berjalannya waktu mengalami pengurangan direalokasi ke satker lain, sehingga pagu akhir sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp 24.655.310.000 dengan realisasi Rp 24.653.579.580 (99,99 %). Selain itu evaluasi indikator kinerja mengakibatkan penyesuaian perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja revisi terakhir pada bulan Oktober 2024 telah ditetapkan 6 Sasaran Strategis (SS) dan 24 indikator kinerja, dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPBAP Ujung Batee sampai dengan Tahun 2024 sesuai aplikasi “kinerjaku” adalah sebesar 114,39 %. Dari 24 indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan pengukuran capaian terdapat 22 indikator telah mencapai target yaitu:

1. Nilai PNBP yang diperoleh tercapai 124,10 %
2. Persentase pakan mandiri yang diproduksi tercapai 125,24 %
3. Persentase calon induk unggul yang diproduksi tercapai 100,38 %
4. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan tercapai 165,63 %
5. Persentase bantuan benih yang disalurkan tercapai 137,68 %
6. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan tercapai 103,03 %
7. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan tercapai 100 %
8. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji tercapai 142,24 %
9. Persentase pengujian Antimicrobial Resistance (AMR) tercapai 105,71 %
10. Persentase pakan ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan tercapai 191,67 %
11. Nilai penilaian mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee tercapai 101,59 %
12. Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee tercapai 101,55 %
13. Hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tercapai 104,57 %



14. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilayah kerja BPBAP Ujung Batee tercapai 116,28 %
15. Persentase penyelesaian laporan hasil pemeriksaan BPK Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 100 %
16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee tercapai 125 %?
17. Indikator inerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee tercapai 102,41 %
18. Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee tercapai 111,13 %
19. Nilai kinerja perencanaan anggaran BPBAP Ujung Batee tercapai 105,63 %
20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPBAP Ujung Batee tercapai 102,05 %.
21. Nilai pengawasan kearsipan BPBAP Ujung Batee hanya tercapai 110,58 %
22. Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee tercapai 125 %.

Kemudian indikator kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu:

1. Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA tercapai 95,56 %
2. Indeks pengelolaan kepegawaian tercapai 75 %

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan internal yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan perikanan budi daya secara berkelanjutan, karena diyakini dengan potensi dan kekuatan yang ada, perikanan budi daya mampu memberi kontribusi pada 9 agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budi daya yang memiliki daya saing. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategis (RENSTRA) Perikanan Budi Daya 2020-2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam beberapa perspektif dengan masing-masing indikator kinerja seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Balai Budidaya Perikanan Air Payau Ujung Batee (BPBAP) Ujung Batee. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPBAP Ujung Batee Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan



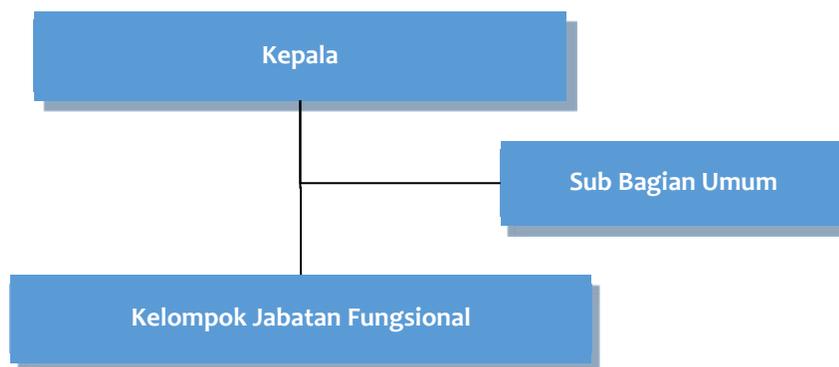
yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, disebutkan bahwa tugas Balai Budidaya Perikanan Air Payau (salah satunya BPBAP Ujung Batee) adalah ***“melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budi daya air payau”***. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBAP Ujung Batee mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budi daya air payau;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budi daya air payau;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budi daya air payau;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budi daya air payau;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budi daya air payau;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budi daya air payau;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budi daya air payau;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budi daya air payau;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budi daya air payau;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budi daya air payau; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas: a) Subbagian Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



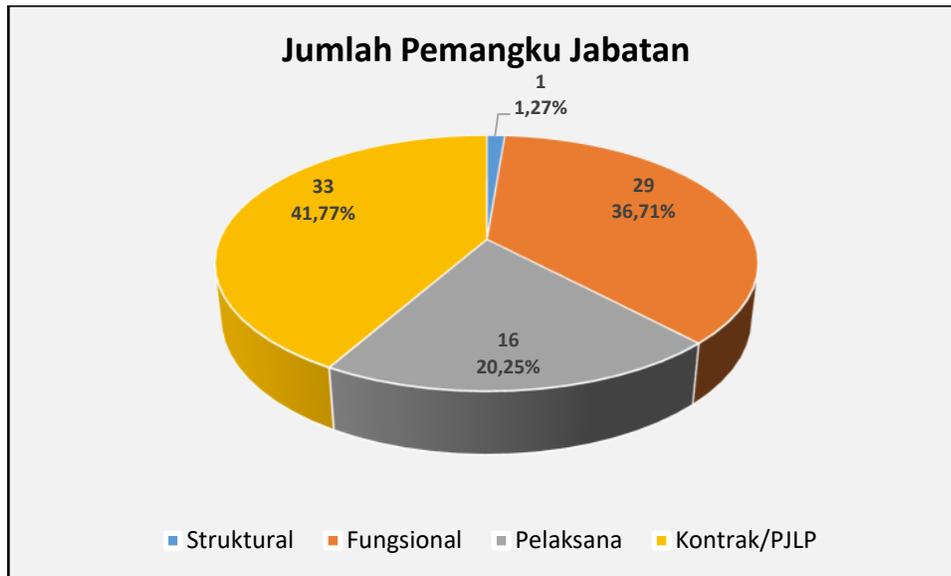
Gambar 1. Struktur Organisasi BPAP Ujung Batee

1.4. Sumber Daya Manusia

Total keseluruhan pegawai BPAP Ujung Batee sebanyak 79 orang, dengan rincian status PNS sebanyak 40 orang dan PPPK sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak/PJLP sebanyak 33 orang. Pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh fungsional tertentu sebanyak 29 orang, sementara pelaksana hanya sebanyak 16 orang, dan pejabat struktural 1 orang.

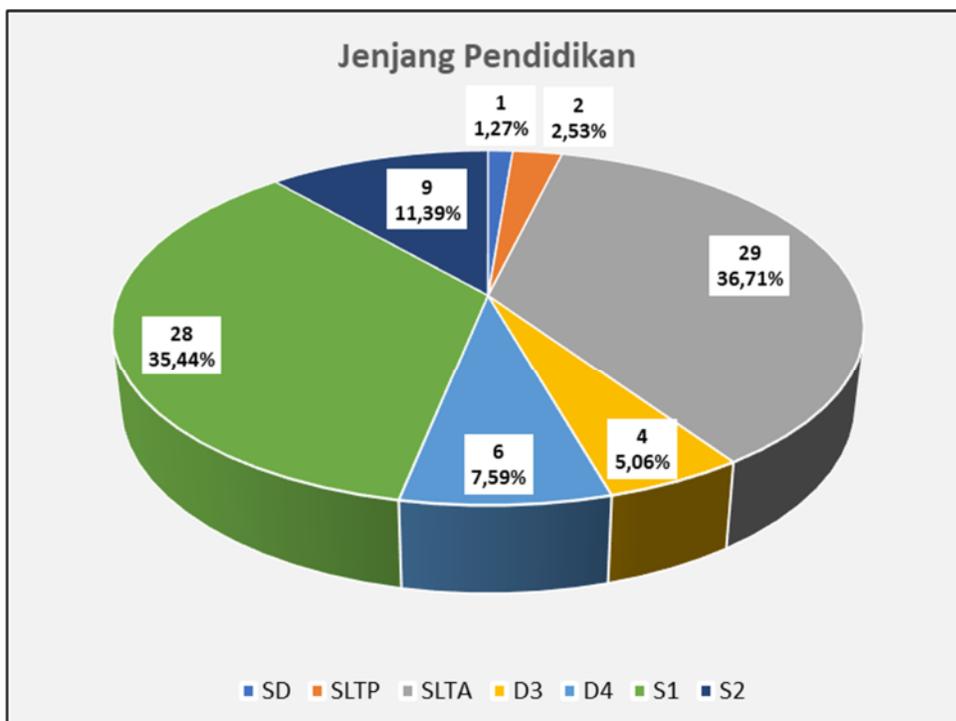
Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status ASN Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Nama/Jenjang Jabatan	PNS (orang)	PPPK (orang)
1	Struktural	1 Kepala Balai	1	
		2 Kepala Sub Bagian Umum	-	
2	Fungsional	1 Analis Akuakultur Ahli Madya	1	
		2 Analis Akuakultur Ahli Muda	8	
		3 Analis Akuakultur Ahli Pertama	2	3
		4 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	2	
		5 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1	1
		6 Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	
		7 Teknisi Akuakultur Mahir	4	
		8 Teknisi Akuakultur Pemula		2
		9 Teknisi Akuakultur Terampil	2	
		10 Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	1	
		11 Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	1	
3	Pelaksana	1 Analis Tata Usaha	1	
		2 Pengelola Barang Milik Negara	1	
		3 Pengelola Keuangan	1	
		4 Pengelola Laboratorium	1	
		5 Pengelola Surat	1	
		6 Penyusun Laporan Keuangan	1	
		8 Teknisi Listrik dan Jaringan	1	
		9 Teknisi Perikanan Budidaya	9	
		PNS dan PPPK		
Tenaga Kontrak/PJLP				33



Gambar 2. Pegawai BPAP Ujung Batee berdasarkan jabatan

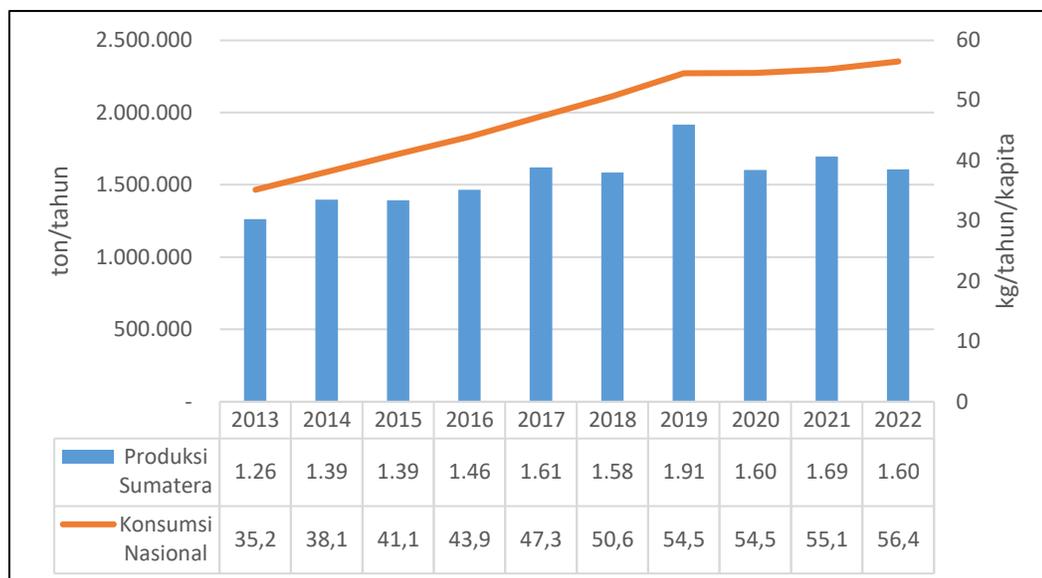
Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPAP Ujung Batee adalah sebagai berikut: (i) S2 sebanyak 9 orang (11,39 %); (ii) S1 sebanyak 28 orang (35,44 %); (iii) D4 sebanyak 6 orang (7,59 %); (iv) D3 sebanyak 4 orang (5,06 %); (v) SLTA sebanyak 29 orang (36,71 %); (vi) SLTP sebanyak 2 orang (2,53 %); dan (vii) SD sebanyak 1 orang (1,27 %).



Gambar 3. Pegawai BPAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya

Selama 10 tahun terakhir konsumsi ikan secara nasional mengalami peningkatan sebesar 60,41 %, tahun 2013 hanya 35,2 kg/tahun/kapita menjadi 56,4 kg/tahun/kapita di 2022. Sementara Volume produksi perikanan budidaya untuk wilayah Sumatera (sebagai wilayah kerja BPBAP Ujung Batee) tidak mengalami peningkatan sebanding dengan konsumsi ikan nasional, hanya meningkat sebesar 27,25 % dari tahun 2013 hanya 1,26 juta ton/tahun menjadi 1,6 juta ton/tahun di 2022 (sumber data diolah dari <https://statistik.kkp.go.id>). Adanya ketimpangan antara kebutuhan konsumsi ikan nasional dengan volume produksi menjadi potensi bagi BPBAP Ujung Batee untuk mendukung peningkatan volume produksi, melalui penyediaan induk dan benih yang berkualitas maupun bimbingan teknis perikanan budidaya.



Gambar 4. Potensi Perikanan Budi Daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal.

- a. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (v) pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan) belum optimal diterapkan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan (vii) kondisi



- infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.
- b. Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) ruang untuk usaha perikanan budi daya belum ada kepastian memadai, (ii) regulasi dan perizinan lintas sektoral belum begitu simetrik sehingga menghambat perkembangan usaha perikanan budi daya, dan (iii) perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan.

Lebih spesifik lagi permasalahan yang dihadapi BPBAP Ujung Batee yaitu adanya ketimpangan antara sumber daya (baik SDM maupun dukungan anggaran) dengan luas wilayah kerja. Wilayah kerja BPBAP Ujung Batee mencakup seluruh Sumatera yang begitu luas. Anggaran hanya cukup mengakomodir kegiatan di Aceh dan Sumut, selain itu instalasi budi daya perikanan BPBAP Ujung Batee hanya satu dan berada di Aceh Besar, sehingga sulit untuk menjangkau wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, maupun Lampung.

Isu strategis perikanan budidaya pada wilayah kerja BPBAP Ujung Batee meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Ketergantungan pada Impor Benih Udang: Sumatera masih mengimpor benih udang dari luar daerah, sehingga harga menjadi tidak kompetitif.
2. Keterbatasan Lahan dan Sumber Daya: Keterbatasan lahan dan sumber daya, seperti air dan listrik, menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan budidaya.
3. Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Masyarakat: Pengembangan perikanan budidaya yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan.
4. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Petambak: Peningkatan kapasitas dan kemampuan petambak dalam mengelola usaha perikanan budidaya masih diperlukan.
5. Pengembangan Pasar dan Pemasaran Produk Perikanan: Pengembangan pasar dan pemasaran produk perikanan masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan Sumatera.
6. Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya: Pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya perikanan masih perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan perikanan budidaya.
7. Pengembangan Teknologi dan Inovasi: Pengembangan teknologi dan inovasi dalam perikanan budidaya masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BPBAP Ujung Batee Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBAP Ujung Batee selama kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBAP Ujung Batee serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBAP Ujung Batee, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran Tahun 2024, penetapan kinerja BPBAP Ujung Batee serta pengukuran/pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi indikator kinerja BPBAP Ujung Batee serta evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Merujuk pada visi besar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budi daya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budi daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Sedangkan tujuan pembangunan perikanan budi daya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budi daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budi daya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah disebutkan di atas, BPBAP Ujung Batee menetapkan tujuan pokok dalam kegiatannya yaitu:

1. Melaksanakan uji terap teknik perikanan budi daya air payau;



2. Melaksanakan penyiapan bahan standardisasi perikanan budi daya air payau;
3. Melaksanakan sertifikasi sistem perikanan budi daya air payau;
4. Melaksanakan kerja sama teknis perikanan budi daya air payau;
5. Mengelola pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budi daya air payau;
6. Melaksanakan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budi daya air payau;
7. Melaksanakan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budi daya air payau;
8. Melaksanakan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budi daya air payau;
9. Melaksanakan bimbingan teknis perikanan budi daya air payau.

Untuk melakukan pengukuran atas pencapaian tujuan yang ditetapkan maka harus ditetapkan pula sasaran strategis yang menjadi indikator keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Sasaran peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang berkembang. BPBAP Ujung Batee telah menetapkan Sasaran Strategis dalam kurun waktu 5 tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee 2020 - 2024.

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee.**
Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Nilai PNBPN satker BPBAP Ujung Batee
2. **Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 2) Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 3) Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 4) Produksi calon induk di lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 5) Tersalurkannya sarana dan prasarana Bioflok ke masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 6) Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat
3. **Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan.**
Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 7) Persentase produksi pakan mandiri dibandingkan dengan bahan baku yang tersedia lingkup BPBAP Ujung Batee



4. **Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang pakan dan obat ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 8) Persentase jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan oleh BPBAP Ujung Batee
5. **Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 9) Persentase sampel layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 10) Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPBAP Ujung Batee
6. **Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 11) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 12) Persentase Penyelesaian LHP BPK atas Satker BPBAP Ujung Batee
 - 13) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 14) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 15) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker BPBAP Ujung Batee
 - 16) Nilai Kinerja Anggaran satker BPBAP Ujung Batee
 - 17) Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa satker BPBAP Ujung Batee
 - 18) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satker BPBAP Ujung Batee
 - 19) Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 20) Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 21) Persentase layanan perkantoran lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 22) Nilai pengawasan kearsipan lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 23) Hasil penilaian konsensus Zona Integritas lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 24) Persentase jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilker BPBAP Ujung Batee

Matriks keselarasan indikator kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024 dengan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja 2024 dapat dilihat lebih detail pada Lampiran 1.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus



perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja BPBAP Ujung Batee tahun 2024 dituangkan dalam perjanjian kinerja (sebagai mana terlampir).

Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat Di BPBAP Ujung Batee	1.	Nilai PNPB yang Diperoleh (Rupiah)	1.232.517.000
2.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pakan Ikan untuk Pembudidaya Ikan	2.	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		6.	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8.	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		9.	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan Dan Obat Ikan	10.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
6.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di BPBAP Ujung Batee	11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82
		12.	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85
		14.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		15.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		16.	Persentase Pemberitaan Netral Dan Positif Terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86
		17.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
		18.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
		19.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,76
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	80,0
		21.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	71
22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80,0		



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	23. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
	24. Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	80

Perjanjian kinerja pada tahun 2024 juga mengalami perubahan, yaitu "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee", target sebesar 71. Awalnya indikator kinerja ini berbunyi "Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee", target sebesar 86. Nilai kinerja perencanaan dianggap lebih relevan dan spesifik, sementara nilai kinerja anggaran sudah tercermin dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator kinerja 2024 semula dengan indikator kinerja 2024 akhir dapat dilihat lebih detail pada Lampiran 2.

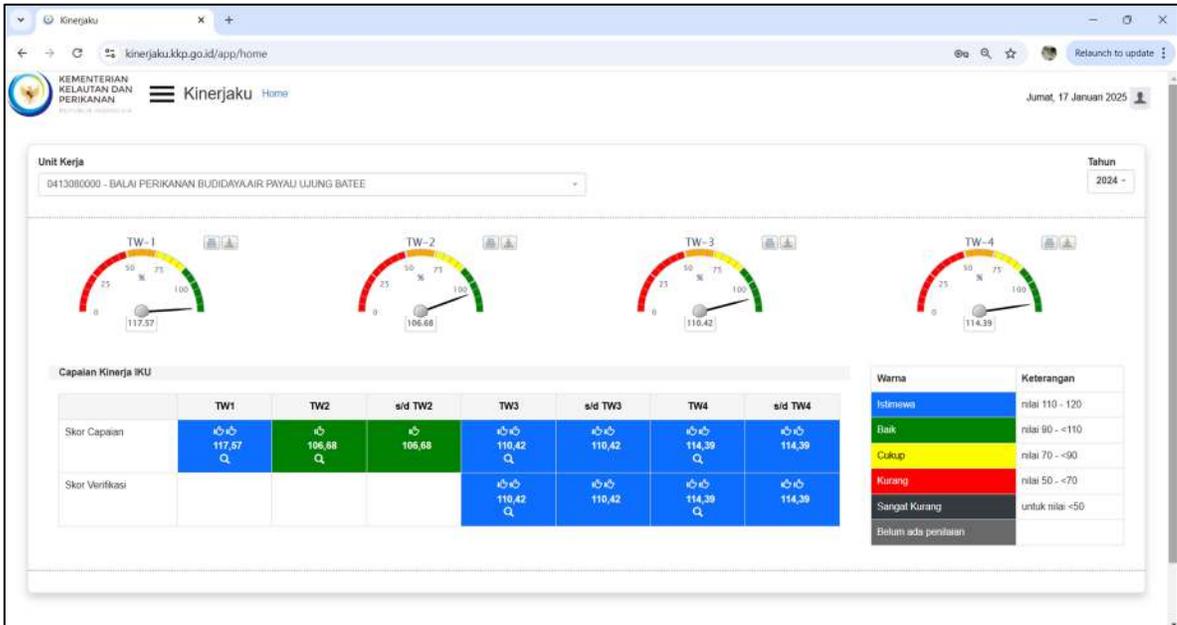
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BPBAP Ujung Batee menggunakan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*. 1) *Maximize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik; 2) *Minimize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik; dan 3) *Stabilize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Pengukuran capaian Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>;
5. Status capaian Indikator Kinerja yang ada dalam aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> ditunjukkan dengan warna: (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual IKU.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implemementasi aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.



Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi Kinerjaku tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>, terlihat bahwa Nilai Capaian Kinerja BPBAP Ujung Batee sebesar 114,39 % yang berada dalam kategori ISTIMEWA. Artinya secara umum indikator kinerja sudah mencapai target.



BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada Tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPBAP Ujung Batee menitikberatkan pada 6 Sasaran Strategis dengan 24 indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id" diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 114,39 %. Adapun rekapitulasi capaian kinerja BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja

	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	Nilai PNBP yang diperoleh	1.232.517	Ribuan Rupiah	1.529.567	124,10
2	Persentase pakan mandiri yang diproduksi	80	Persen	100,19	125,24
3	Persentase calon induk unggul yang diproduksi	100	Persen	100,38	100,38
4	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan	75	Persen	124,22	165,63
5	Persentase bantuan benih yang disalurkan	75	Persen	103,26	137,68
6	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan	100	Persen	103,03	103,03
7	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan	100	Persen	100	100
8	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji	100	Persen	142,24	142,24
9	Persentase pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)	100	Persen	105,71	105,71
10	Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan	100	Persen	191,67	191,67
11	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee	82	Nilai	83,30	101,59
12	Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee	91	Persen	86,96	95,56
13	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee	85	Indeks	86,32	101,55
14	Indeks pengelolaan kepegawaian	4	Indeks	3	75
15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	76	Nilai	79,47	104,57
16	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee	86	Persen	100	116,28
17	Persentase penyelesaian laporan hasil pemeriksaan BPK Satker BPBAP Ujung Batee	100	Persen	100	100
18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee	80	Persen	100	125,00
19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee	93,76	Nilai	96,02	102,41
20	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	88,90	111,13
21	Nilai kinerja perencanaan anggaran BPBAP Ujung Batee	71	Nilai	75,00	105,63
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	81,64	102,05
23	Nilai pengawasan kearsipan BPBAP Ujung Batee	75	Nilai	82,94	110,58
24	Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee	80	Persen	100,00	125,00



Capaian target indikator kinerja Tahun 2024 ada 2 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator kinerja: Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee (IKM12), dan Indeks pengelolaan kepegawaian (IKM14). Sementara target indikator kinerja yang mencapai dan melebihi target sebanyak 22 indikator. Secara umum indikator kinerja BPBAP Ujung Batee telah tercapai. Begitu pun pada capaian kinerja secara keseluruhan terlihat capaian target mencapai 114,39 % (dapat dilihat pada Gambar 5).

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut:

1. SS-1: Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat di BPBAP Ujung Batee

IK-1: Nilai PNBPN yang diperoleh

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dasar hukum pemungutan PNBPN pada BPBAP Ujung yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang pedoman umum PNBPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber PNBPN BPBAP Ujung Batee berasal dari:

- 1) Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yaitu PNBPN yang berasal dari pungutan perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budi daya Perikanan.
- 2) PNBPN Non SDA yaitu PNBPN yang berasal dari penjualan hasil usaha budi daya dan imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. PNBPN ini terdiri dari: (i) Penjualan hasil Perikanan Budi daya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv) Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

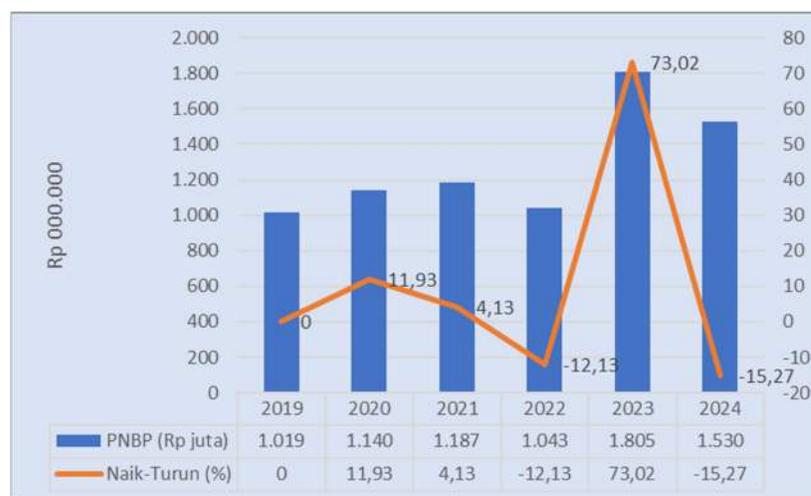
Tabel 4. Nilai PNBPN yang diperoleh

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Rp 000)	2020 (Rp 000)	2021 (Rp 000)	2022 (Rp 000)	2023 (Rp 000)	Target (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	%	Target 2024 (Rp 000)	% Capaian 2024 terhadap 2024
1.018.761	1.140.297	1.187.390	1.043.320	1.805.160	1.232.517	1.529.567	124,10	1.514.286	101,01

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Realisasi PNBP pada tahun 2024 sudah melampaui target dengan capaian hingga 124,10 % dari target sebesar Rp 1,2 Milyar. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian PNBP tahun 2024 lebih rendah dibandingkan capaian PNBP tahun 2023 namun lebih tinggi dibandingkan capaian PNBP pada kisaran tahun 2019-2022.

Penyebab turunnya PNBP pada umumnya lebih disebabkan oleh sumber-sumber utama PNBP mengalami gangguan penyakit pada awal tahun sehingga setoran PNBP kurang maksimal. Sumber utama PNBP yang pertama yaitu calon induk yang diproduksi, dimana akhir dari produksi calon induk sebagai setoran PNBP. Kedua pengujian dan pengendalian penyakit, di mana jasa-jasa pengujian sampel dari pihak eksternal sebagai setoran PNBP. Selain itu produksi benih lebih mendahulukan untuk dihibahkan ke masyarakat setelah target hibah dicapainya barulah selanjutnya akan dijadikan setoran PNBP.



Gambar 6. Perolehan PNBP 2019-2024

Berdasarkan data dari tahun 2019-2024 bahwa realisasi PNBP mengalami naik turun. Hal ini bisa terjadi karena PNBP bergantung anggaran operasional kegiatan teknis dan anggaran operasional kegiatan teknis tersebut sebagai sumber utama PNBP, di mana anggaran tersebut setiap tahunnya mengalami naik turun. Terlihat realisasi PNBP terendah pada tahun 2019 hanya sebesar 1,01 milyar rupiah dan tertinggi pada 2023 mencapai sebesar 1,8 milyar rupiah. Penurunan PNBP terlihat pada tahun 2022 sebesar 12,13 % dan tahun 2024 sebesar 15,27 % sedangkan peningkatan PNBP tertinggi pada tahun 2023 mencapai 73,02 %. Perolehan PNBP tahun 2023 menjadi *all time high* (ATH) selama periode pengamatan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung



Berdasarkan surat dari Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.233/DJPB.1/KU.340/I/2025 tertanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan IV Tahun 2024, realisasi PNBP satker BPBAP Ujung Batee dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5. Sumber PNBP yang diperoleh

No	Jenis Pendapatan	Target Sesuai PK	Realisasi s/d Desember 2024	% Sesuai PK	Keterangan
1	Pendapatan Fungsional dan Umum	1.232.517.000	1.463.997.287	118,78	
2	Pendapatan Non Anggaran	-	65.569.438	-	
	Jumlah PNBP	1.232.517.000	1.529.566.725	124,10	Capaian IKU

Tahun 2023 terjadi perubahan formulasi di mana indikator kinerja “Nilai PNBP yang Diperoleh” merupakan semua PNBP yang disetorkan BPBAP Ujung Batee. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana PNBP yang diakui sebagai capaian indikator kinerja hanya pendapatan fungsional dan umum tidak termasuk pendapatan non anggaran. Pendapatan non anggaran bersumber dari penerimaan kembali belanja pegawai, penerimaan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, dan penerimaan kembali belanja modal. Pada tabel terlihat dari pendapatan fungsional dan umum sebesar 1,4 milyar rupiah sudah dapat melampaui target 1,2 milyar rupiah atau tercapai 118,78 %.

Tabel 6. Perbandingan capaian PNBP antar satker

No	Satuan Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	1.590.081.000	2.720.199.314	171,07
2	BBPBAP Jepara	4.500.400.000	5.907.372.829	131,26
3	BBPBL Lampung	1.189.308.000	1.320.350.650	111,02
4	BPBAP Ujung Batee	1.232.517.000	1.529.567.000	124,10
5	BPBAT Sungai Gelam	1.555.000.000	2.231.617.695	143,51
6	BPBL Batam	1.274.795.000	1.394.750.966	109,41
7	BPBAP Situbondo	3.552.374.000	71.502.985.814	2012,82
8	BPBAT Mandiangin	1.214.288.000	2.014.602.924	165,91
9	BPBAT Tatelu	1.212.600.000	1.511.886.345	124,68
10	BPBAP Takalar	1.683.158.000	2.662.185.275	158,17
11	BPBL Lombok	781.085.000	1.230.058.316	157,48
12	BPBL Ambon	968.400.000	1.047.956.775	108,22
13	BPKIL Serang	1.100.000.000	1.224.279.457	111,30
14	BLUPPB Karawang	27.358.090.000	16.327.953.666	59,68
15	BPIU2K Karangasem	723.400.000	932.200.254	128,86

Capaian PNBP paling tinggi diraih oleh BLU BPBAP Situbondo dengan capaian sebesar 2012,82%, dan capaian PNBP terendah oleh BLUPPB Karawang dengan capaian hanya sebesar 59,68%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee sendiri berada pada posisi ke-10 dari 15 satker yang ada dengan capaian PNBP yaitu sebesar 124,1%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III



Kendala yang terjadi pada triwulan III adalah benih diprioritaskan untuk kegiatan hibah sehingga perolehan PNBP meningkat drastis di akhir-akhir tahun. Kendala tersebut sudah ditindaklanjuti dengan cara memaksimalkan produksi benih untuk meningkatkan target PNBP.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Adapun kendala pencapaian target tahun 2024 yaitu sumber-sumber PNBP selain dari produksi perikanan terutama udang belum mampu mendekati proporsional sebagai setoran PNBP.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana tindak lanjut periode berikutnya yaitu 1) mengidentifikasi potensi-potensi setoran PNBP; 2) melakukan monitoring dan evaluasi lebih aktif sehingga potensi penghambat dapat segera diambil keputusan.

2. SS-2: Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan

IK-2: Persentase pakan mandiri yang diproduksi

Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders bidang perikanan budi daya, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan memberikan dampak positif terhadap kinerja perikanan budi daya sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Terkait dengan bidang perikanan budi daya, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan meliputi bidang pakan dan obat ikan, perbenihan, produksi dan usaha budi daya dan kawasan kesehatan ikan dan lingkungan budi daya.

Produksi pakan mandiri BPBAP Ujung Batee bertujuan untuk menyediakan pakan buatan untuk operasional budi daya lingkup BPBAP Ujung Batee. Pakan buatan yang dihasilkan adalah pakan terapung untuk ikan air payau dan pakan tenggelam untuk ikan air payau.

Tabel 7. Persentase pakan mandiri yang diproduksi

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (kg)	2020 (kg)	2021 (kg)	2022 (kg)	2023 (kg)	Target (kg)/(%)	Realisasi (kg)/(%)	%	Target 2024 (kg)	% Capaian 2024 terhadap 2024
84,410.00	85,800.00	27,086.00	45,800.00	50,600.00	57,690.00	57,800.00	100.19	37,000.00	156.22
-	-	-	-	110.48	80.00	100.19	125.24	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pakan ikan yang diproduksi tercapai sebesar 57.800 kg atau 125,24 % dari target 57.690 kg. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, bahwa realisasi produksi pakan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 114,23 %. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis karena dalam Rencana Strategis 2020-2024 pakan ikan diproduksi untuk operasional belum diakomodir.



Gambar 7. Produksi pakan tahun 2019-2024

Pertumbuhan produksi pakan terlihat mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 68,43 %, hal ini disebabkan tingginya pemotongan anggaran produksi sehingga berimbas pada menurunnya volume produksi. Produksi pakan juga ditentukan alokasi anggaran, seperti tahun 2019 dan 2020 produksi pakan cukup tinggi karena pada saat ini alokasi anggaran untuk produksi pakan lumayan besar.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran pakan yang diproduksi untuk operasional pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 738.432.000 dengan realisasi mencapai Rp 738.422.300 (100 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi volume produksi maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output melebihi 100 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 100 %.

Tabel 8. Produksi dan distribusi pakan

Bulan	Persediaan			Transfer Persediaan		Sisa Persediaan 2024
	Produksi 2023	Produksi 2024	Total Persediaan	Penjualan	Kadaluar/ Penyusutan	
Sisa Pakan 2023	42.600	-	42.600	-	-	42.600
Januari	-	-	42.600	13.500	-	29.100
Februari	-	-	29.100	6.500	9.000	13.600
Maret	-	-	13.600	3.600	-	10.000
April	-	6.000	16.000	640	-	15.360
Mei	-	12.000	27.360	360	-	27.000
Juni	-	6.600	33.600	-	-	33.600



Bulan	Persediaan			Transfer Persediaan		Sisa Persediaan 2024
	Produksi 2023	Produksi 2024	Total Persediaan	Penjualan	Kadaluar/ Penyusutan	
Juli	-	-	33.600	-	-	33.600
Agustus	-	-	33.600	-	-	33.600
September	-	-	33.600	-	-	33.600
Oktober	-	-	33.600	800	-	32.800
November	-	-	32.800	-	-	32.800
Desember	-	33.200	32.800	7.920	10.000	48.080
Jumlah	42.600	57.800	48.080	33.320	19.000	48.080

Awal tahun 2024 terlihat produksi pakan sangat rendah berbeda dengan di akhir tahun, hanya terdapat penjualan dari persediaan sebelumnya. Hal ini karena terdapat kegiatan uji coba mesin *extruder* serta sanitasi pada gudang dan mesin pakan sehingga pabrik pakan sementara sempat tidak produksi pada bulan tertentu.

Tabel 9. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri

No	Satuan Kerja	Target (kg)	Realisasi (kg)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	151.390	107.200	70,81
2	BBPBAP Jepara	113.190	112.333	99,24
3	BBPBL Lampung	62.190	62.210	100,03
4	BPBAP Ujung Batee	57.690	57.800	125,24
5	BPBAT Sungai Gelam	252.390	215.088	85,22
6	BPBAP Situbondo	62.190	53.520	86,06
7	BPBAT Mandiangin	63.290	63.985	101,10
8	BPBAT Tatelu	66.500	62.813	94,46
9	BPBAP Takalar	25.411	33.535	131,97
10	BLUPPB Karawang	25.949	22.545	86,88

Capaian produksi pakan mandiri paling tinggi diperoleh oleh BPBAP Takalar yaitu mencapai 131,97%, dan capaian paling terendah diperoleh oleh BPBAT Sungai Gelam yaitu hanya sebesar 85,22%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada pada posisi ke-2 dari 10 satker yang menjadi perbandingan.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Pemanfaatan pakan yang diproduksi mandiri terutama untuk operasional internal balai karena masyarakat belum begitu berminat memanfaatkan pakan produksi balai. Kendala ini ditindaklanjuti dengan sosialisasi pakan mandiri yang diproduksi oleh balai ke pembudidaya perikanan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kegiatan uji coba produksi pakan terapung dengan mesin *extruder* serta sanitasi gudang pakan serta mesin pakan menjadi permasalahan di awal tahun untuk pencapaian indikator. Namun produksi pakan mandiri dapat terus berjalan sampai akhir tahun untuk memenuhi capaian target.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Melanjutkan operasional produksi pakan mandiri sesuai target yang ditentukan serta sosialisasi pakan mandiri ke masyarakat agar lebih mengenal pakan mandiri produksi balai.

3. SS-3: Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

IK-3: Persentase calon induk unggul yang diproduksi

Produksi induk unggul di BPAP Ujung Batee bertujuan untuk menyediakan induk bagi unit perbenihan pada masyarakat stakeholder perikanan budi daya. Tersedianya induk unggul akan mendukung peningkatan produksi benih yang merupakan komponen utama kegiatan pengembangan kualitas dan kuantitas produksi perikanan budi daya.

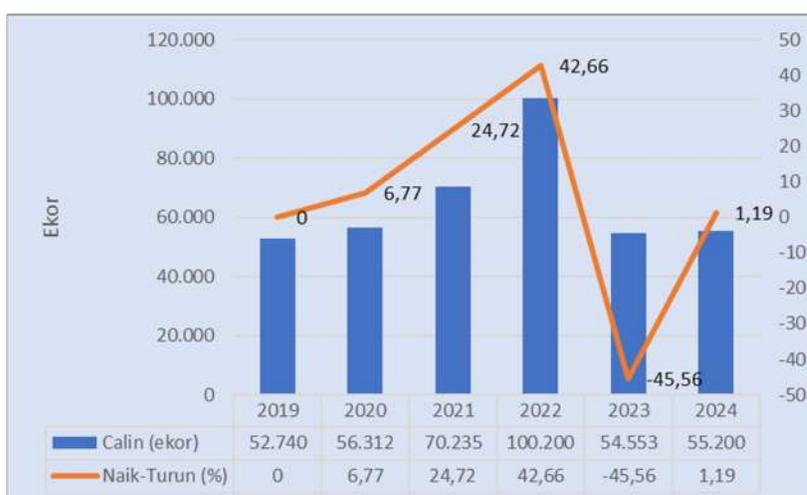
Tabel 10. Persentase produksi calon induk unggul

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (ekor)	2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	2023 (ekor)	Target (ekor)/(%)	Realisasi (ekor)/(%)	%	Target 2024 (ekor)	% Capaian 2024 terhadap 2024
52.740,00	56.312,00	70.235,00	100.200,00	54.553,00	54.991,00	55.200,00	100,38	70.000,00	78,86
-	-	-	-	103,71	100,00	100,38	100,38	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Calon induk unggul yang diproduksi mampu mencapai sebanyak 55.200 ekor atau 100,38 % dari target 54.991 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun pengamatan (2019-2023), bahwa realisasi tahun 2022 yang tertinggi mencapai 100.200 ekor sementara terendah tahun 2019 hanya 52.740 ekor. Perkembangan calon induk unggul yang diproduksi BPAP Ujung disajikan dalam grafik berikut.



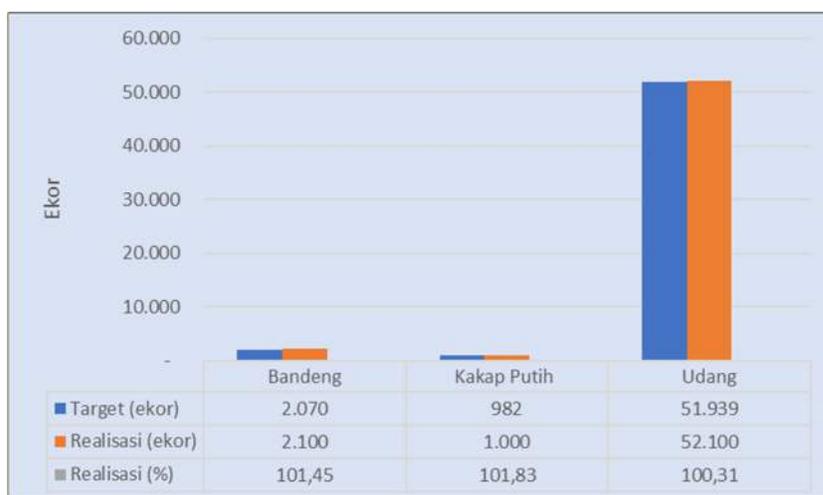
Gambar 8. Perkembangan produksi calon induk bermutu 2019-2024

Data *time series* 2019-2024 menunjukkan calon induk yang diproduksi mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2023. Dimulai dari tahun 2019 hanya

mampu mencapai 52.740 ekor, kemudian tahun 2020 sebanyak 56.312 ekor atau meningkat 6,77 %, tahun 2021 sebanyak 70.235 ekor atau meningkat 24,72 %, dan puncaknya pada tahun 2022 mampu mencapai hingga 100.200 ekor atau meningkat 42,66 %. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga 45,56 % atau terproduksi hanya 54.553 ekor saja. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sebesar 1,19 % atau capaian produksi sebesar 55.200 ekor.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Calon induk unggul yang diproduksi pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.664.197.000 dengan realisasi mencapai Rp 2.664.041.782 (99,99 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi produksi calon induk maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output mencapai 100,38 % tidak jauh berbeda dengan realisasi anggaran mencapai 99,99 %. Berikut disajikan komoditas yang diproduksi.



Gambar 9. Komoditas produksi calon induk bermutu

Grafik menunjukkan calon induk unggul yang diproduksi berdasarkan komoditas. Udang Vaname mampu merealisasikan sebanyak 52.100 ekor atau 100,31 % dari target 51.939 ekor. Realisasi produksi calon induk Kakap Putih sebanyak 1000 ekor atau 101,83 % dari target 982 ekor dan calon induk Bandeng mencapai realisasi 101,45 % dari target 2.070 ekor.

Tabel 11. Perbandingan capaian produksi calon induk

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	167.638	193.350	115,34
2	BBPBAP Jepara	97.421	99.010	101,63
3	BBPBL Lampung	4.305	4.446	103,28
4	BPBAP Ujung Batee	54.991	55.200	100,38
5	BPBAT Sungai Gelam	119.901	124.184	103,57
6	BPBL Batam	4.048	4.837	120,38
7	BPBAP Situbondo	80.981	89.381	110,37
8	BPBAT Mandiangin	113.690	125.898	110,74



No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
9	BPBAT Tatelu	80.343	88.200	109,78
10	BPBAP Takalar	77.979	80.459	100,60
11	BPBL Lombok	3.476	4.042	116,28
12	BPBL Ambon	4.090	4.191	102,47
13	BLUPPB Karawang	74.724	80.112	107,21
14	BPIU2K Karangasem	114.413	129.823	113,47

Capaian produksi calon induk paling besar yaitu BPBL Batam dengan capaian 120,38%, dan capaian produksi calon induk paling kecil yaitu BPBAP Ujung Batee dengan capaian hanya 100,38%, berada pada posisi ke-14 dari 14 satker yang menjadi perbandingan.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Telah dilakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi calon induk. Perbaikan sarana dan prasarana produksi calon induk juga sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi calon induk.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Keterbatasan fasilitas untuk pemeliharaan calon induk bandeng dan calon induk kakap putih sehingga mempengaruhi proses produksi calon induk.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan yaitu akan melakukan monitoring pelaksanaan produksi dan memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga dapat meningkatkan produksi calon induk unggul.

IK-4: Persentase bantuan calon induk yang disalurkan

Persentase bantuan calon induk yang disalurkan merupakan kegiatan bantuan calon induk ikan yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan. Adapun komoditas-komoditas calon induk yang disalurkan ke masyarakat mengaju pada petunjuk teknis penyaluran bantuan calon induk tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP. Capaian diukur berdasarkan persentase jumlah penyaluran bantuan calon induk ikan dibandingkan dengan jumlah target bantuan calon induk ikan sesuai anggaran yang disediakan.

Tabel 12. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (ekor)	2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	2023 (ekor)	Target (ekor)/(%)	Realisasi (ekor)/(%)	%	Target 2024 (ekor)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	168.00	-	1,630.00	805.00	1,000.00	124.22	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-
-	-	-	-	-	75.00	124.22	165.63	-	-

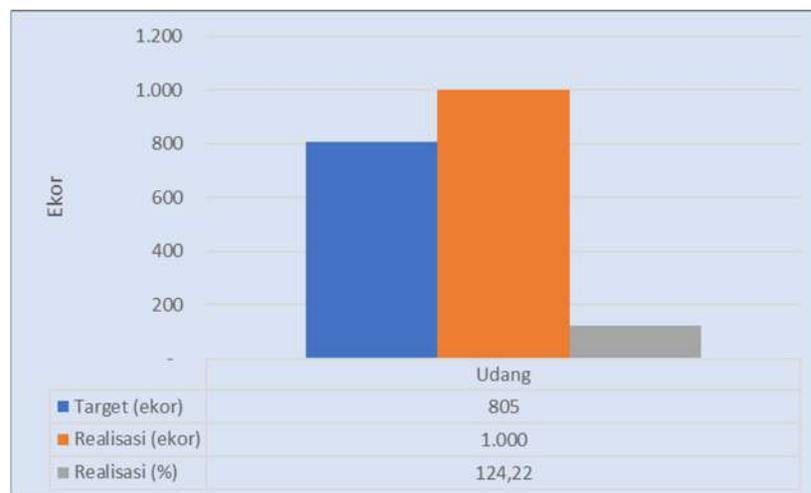
* Perjanjian Kinerja Tahun 2022 indikator menggunakan satuan ekor.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat mampu mencapai sebanyak 1.000 ekor atau 165,63 % dari target 805 ekor. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis karena dalam Rencana Strategis 2020-2024 bantuan calon induk yang disalurkan belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 43.450.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp 43.449.980 (99,99 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi output maka dapat dikatakan penggunaan anggaran lumayan efisiensi, karena realisasi calon induk yang disalurkan ke masyarakat sebesar 165,63 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,99 %. Berikut disajikan bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat.



Gambar 10. Calon induk yang disalurkan

Grafik menunjukkan bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat mampu mencapai realisasi sebesar 124,22 % dari target yaitu sebanyak 805 ekor calon induk dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 43.449.980. Sementara tahun 2023 mampu mencapai 1.630 ekor dengan menghabiskan anggaran Rp 74.960.500.

Tabel 13. Perbandingan capaian bantuan calon induk disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	7.742	9.525	123,03
2	BBPBAP Jepara	-	-	-
3	BBPBL Lampung	32	35	109,38
4	BPBAP Ujung Batee	805	1.000	124,22
5	BPBAT Sungai Gelam	6.856	8.878	129,49
6	BPBL Batam	72	72	100
7	BPBAP Situbondo	-	-	-
8	BPBAT Mandiangin	6.284	6.800	108,21



9	BPBAT Tatelu	5.713	17.085	299,05
10	BPBAP Takalar	3.218	3.400	105,66
11	BPBL Lombok	20	25	125
12	BPBL Ambon	20	30	150
13	BLUPPB Karawang	-	-	-
14	BPIU2K Karangasem	4.983	6.720	134,86

Capaian bantuan calon induk paling besar yaitu BPBAT Tatelu sebesar 299,05%, dan bantuan capaian bantuan calon induk paling rendah yaitu BPBL Batam sebesar 100%. Sedangkan BPAP Ujung Batee berada pada posisi ke-6 dari 11 satker yang menjadi perbandingan dengan capaian sebesar 124,22%. Sebanyak 3 UPT tidak memiliki indikator capaian bantuan calon induk unggul

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Permasalahan pada triwulan III penyaluran calon induk ke masyarakat yang belum mencapai target karena masih dalam proses untuk memproduksi calon induk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk bantuan. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melanjutkan proses produksi calon induk agar sesuai dengan standar.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Keterbatasan fasilitas untuk pemeliharaan calon induk bandeng dan calon induk kakap putih serta tidak adanya kelompok yang mengajukan proposal pengajuan calon induk bandeng.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi proses produksi calon induk serta memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga mampu meningkatkan produksi calon induk dan menghasilkan calon induk yang sesuai dengan standar persyaratan penyaluran ke masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan calon induk.

IK-5: Persentase bantuan benih yang yang disalurkan

Guna pencapaian target kebutuhan bahan baku industri pengolahan dari sektor hulu terutama dari komoditas budi daya unggulan, maka sub sektor perbenihan memegang peranan sangat penting untuk menyediakan benih bermutu yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi, efisiensi dan efektivitas kegiatan budi daya.

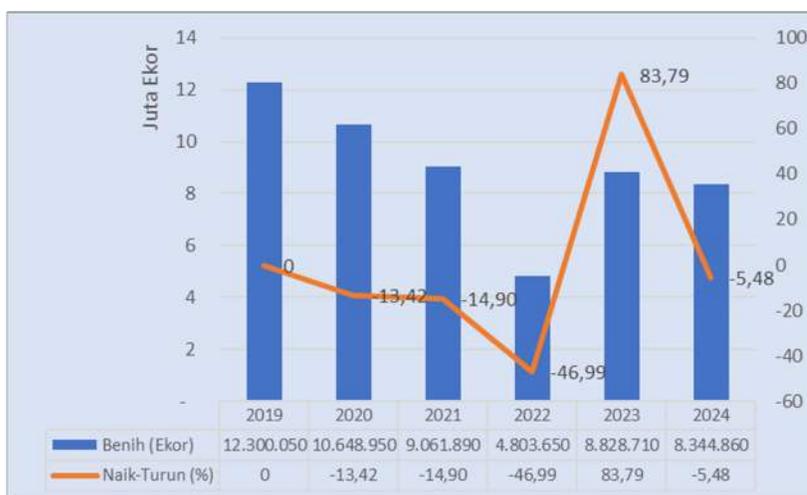
Tabel 14. Persentase bantuan benih yang disalurkan

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (ekor)	2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	2023 (ekor)	Target (ekor)/(%)	Realisasi (ekor)/(%)	%	Target 2024 (ekor)	% Capaian 2024 terhadap 2024
12.300.050,00	10.648.950,00	9.061.890,00	4.803.650,00	8.828.710,00	8.081.492,00	8.344.860,00	103,26	11.110.000,00	75,11
-	-	-	-	106,69	75,00	103,26	137,68	-	-

* Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2024 indikator menggunakan satuan %

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2024 mampu mencapai sebanyak 8.344.860 ekor atau 137,68 % dari target 8.081.492 ekor. Realisasi bantuan benih yang tersalurkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat tahun 2024 sebesar 103,26 % jika dibandingkan dengan target 2024 yaitu 8.081.492 ekor.



Gambar 11. Perkembangan benih yang disalurkan 2019-2024

Data *time series* menunjukkan bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat mengalami tren menurun pada durasi tahun 2019-2022. Dimulai dari tahun 2019 mampu mencapai 12 juta ekor, kemudian tahun 2020 menurun menjadi 10 juta ekor, selanjutnya tahun 2021 menurun lagi menjadi 9 juta ekor, serta tahun 2022 juga menurun menjadi 4 juta ekor. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai titik terendah -46,99 %. Penyaluran benih ke masyarakat pada tahun 2023 mengalami peningkatan hingga 83,79 %. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,48 %. Penurunan ini terjadi antar lain karena faktor kenaikan biaya produksi dan distribusi benih tidak sebanding dengan kenaikan pagu anggaran untuk produksi benih dan distribusi benih. Anggaran untuk produksi benih dan distribusi benih tahun 2019-2020 hanya naik tipis (2019 sebesar Rp 3.057.800.000; dan 2020 sebesar RP 3.411.680.000), sementara tahun 2021-2022 mengalami penurunan (tahun 2021 sebesar RP 1.442.088.000; dan tahun 2022 hanya sebesar Rp 1.389.429.000). Adapun pagu anggaran untuk produksi benih dan distribusi benih pada tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 dengan besaran Rp

2.608.090.000. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk produksi benih dan distribusi benih mengalami penurunan dengan besaran Rp 1.152.241.000.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 1.152.241.000 dengan realisasi mencapai Rp 1.152.149.091 (99,99 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi benih yang disalurkan ke masyarakat maka dapat dikatakan penggunaan anggaran sangat efisien, karena realisasi output sebesar 137,68 % sedangkan realisasi anggaran hanya 99,99 %.



Gambar 12. Komoditas benih yang disalurkan

Bantuan benih yang disalurkan pada tahun 2024 berupa komoditas udang, benih ikan air laut dan benih ikan air payau. Capaian realisasi tertinggi yaitu benih ikan air laut sebesar 153,07 % dan benih ikan air payau hanya mencapai realisasi sebesar 103,68 %. Bantuan benih Udang mampu mencapai target dengan realisasi sebesar 102,47 %.

Tabel 15. Perbandingan capaian bantuan benih disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	10.389.046	17.367.370	167,17
2	BBPBAP Jepara	-	-	-
3	BBPBL Lampung	647.000	647.000	102,09
4	BPBAP Ujung Batee	8.081.492	8.344.860	137,68
5	BPBAT Sungai Gelam	5.77.024	5.836.500	100,99
6	BPBL Batam	556.320	556.500	100,3
7	BPBAP Situbondo	-	-	-
8	BPBAT Mandiangin	3.923.361	4.269.000	108,81
9	BPBAT Tatelu	4.073.431	4.490.700	110,24
10	BPBAP Takalar	16.761.396	16.795.480	100,20
11	BPBL Lombok	343.435	344.170	100,21
12	BPBL Ambon	538.000	541.900	100,72
13	BLUPPB Karawang	-	-	-
14	BPIU2K Karangasem	16.117.820	17.555.000	108,92
15	BPKIL Serang	-	-	-



Capaian bantuan benih yang disalurkan tertinggi yaitu 167,17% oleh BBPBAT Sukabumi, dan capaian benih terendah yaitu BPAP Takalar dengan capaian hanya sebesar 100,20%. Sedangkan BPAP Ujung Batee berada pada posisi ke-2 dari 11 satker yang menjadi perbandingan dengan capaian sebesar 137,68%. Sebanyak 4 UPT tidak memiliki indikator capaian bantuan calon induk unggul

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Permasalahan pada triwulan III beberapa komoditas yang belum mencapai target. Permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melanjutkan kegiatan proses produksi benih serta distribusi benih yang akan disalurkan ke masyarakat.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Terdapat beberapa komoditas yang belum mencapai target produksi sehingga belum dapat dilakukan pendistribusian benih di awal tahun, namun dengan melanjutkan proses produksi tetap dapat dilakukan pendistribusian benih pada tahun berjalan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi proses produksi benih serta memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga mampu meningkatkan produksi benih dan menghasilkan benih yang sesuai dengan standar persyaratan penyaluran ke masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi ketersediaan benih ikan yang diproduksi.

IK-6: Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan

BPAP Ujung Batee selain penyedia benih bermutu, dilakukan pencontohhan pengelolaan produksi dan usaha melalui sarana bioflok yang diserahkan kepada masyarakat sehingga produksi perikanan budi daya dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Budi daya perikanan sistem bioflok merupakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang menggunakan metode pemanfaatan gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang melayang-layang di air. Percontohan produksi dan usaha perikanan budi daya di masyarakat merupakan bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budi daya ikan sistem bioflok. Percontohan produksi dan usaha perikanan budi daya di masyarakat berupa bantuan sarana prasarana produksi budi daya ikan sistem bioflok diperuntukan bagi komoditas ikan Lele dan capaian perhitungan IKU bersifat tahunan.

Tabel 16. Sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat

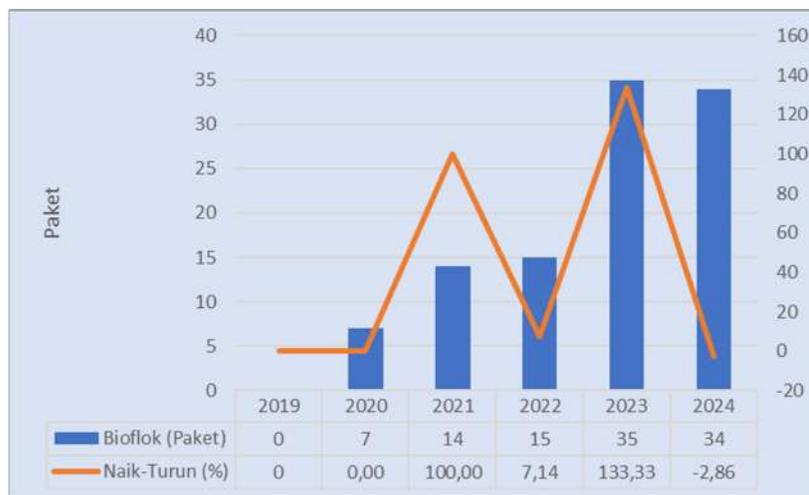
Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (paket)	2020 (paket)	2021 (paket)	2022 (paket)	2023 (paket)	Target (paket)/(%)	Realisasi (paket)/(%)	%	Target 2024 (paket)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	7.00	14.00	15.00	35.00	33.00	34.00	103.03	15.00	226.67
-	-	-	-	106.06	100.00	103.03	103.03	-	-

* Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pada tahun 2024, sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat sudah sepenuhnya selesai disalurkan ke masyarakat mencapai realisasi sebanyak 34 paket atau 103,03 % dari target 33 paket. Sarana produksi bioflok yang telah selesai diserahkan yaitu konstruksi fisik, peralatan, bahan operasional seperti benih, pakan, dan obat-obatan. Jumlah target sarana produksi bioflok pada tahun 2024 yang disalurkan ke masyarakat meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 15 paket.

Indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2024 telah melampaui target 2024, karena seiring waktu berjalan dari tahun ke tahun mengalami penyesuaian target setiap tahunnya pada tahun 2020-2024. Untuk tahun 2018-2019 indikator ini belum diakomodir pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.



Gambar 13. Perkembangan sarana produksi Bioflok yang disalurkan 2019-2024

Data *time series* menunjukkan sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat mengalami kenaikan jumlah paket bantuan. Dimulai dari tahun 2020 mampu menyalurkan 7 paket sarana produksi bioflok, 14 paket pada tahun 2021, 15 paket pada tahun 2022, 35 paket pada tahun 2023 dan 34 paket pada tahun 2024. Adapun peningkatan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 133,33 % sarana produksi bioflok yang tersalurkan ke masyarakat. Terlihat penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2024 mencapai titik terendah sebesar 2,86 % namun capaian jumlah paket sarana produksi bioflok yang tersalurkan telah memenuhi target tahun 2024.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 6.372.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 6.371.999.000 hampir seratus persen terealisasi. Anggaran tersebut sudah termasuk belanja barang non operasional, biaya identifikasi, verifikasi, monitoring calon penerima sarana produksi



bioflok, dan pengadaan sarana produksi bioflok itu sendiri. Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi sarana produksi Bioflok yang disalurkan ke masyarakat maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output melebihi 103 % sedangkan realisasi anggaran hanya mencapai 100 %.

Setiap kelompok menerima satu paket sarana produksi sistem bioflok berupa barang yang terdiri dari benih ikan, pakan ikan, obat ikan dan vitamin, sarana (kolam terpal, intalasi listrik/air/airasi, lantai, tiang, dan atap pelindung), peralatan perikanan; dan pendampingan teknis bioflok.

Tabel 17. Kelompok penerima sarana produksi bioflok

No	Kelompok Penerima	Lokasi	Komoditas
1	Puncak Berseri	Puncak Sari, Kec. Sindang Kertang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	Ikan Nila
2	Sadulur	Puncak Sari, Kec. Sindang Kertang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	Ikan Nila
3	Mulia Jaya	Cinta Karya, Kec. Sindang Kertang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	Ikan Nila
4	Jaya Abadi	Kec. Sindang Kertang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	Ikan Nila
5	Tunas Muda	Meunasah Mesjid, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, Aceh	Ikan Lele
6	Mina Lestari	Lawe Ijo, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	Ikan Lele
7	Maju Jaya	Alas Mesikat, Kec. Babul Rahmah, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	Ikan Nila
8	Barokah	Cinta Makmur, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	Ikan Nila
9	Maju Bersama	Geulumbuk, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, Aceh	Ikan Lele
10	Rukun Tani	Indra Damai, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, Aceh	Ikan Lele
11	Krueng Dhoe	Udeung, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, Aceh	Ikan Nila
12	Muda Sepakat	Jeulanga Barat, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, Aceh	Ikan Lele
13	Berjaya	Teupin Peraho, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Aceh	Ikan Lele
14	Raseuki Raya	Samakurok, Kec. Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Aceh	Ikan Lele
15	Aneuk Barona	Cot Rheue, Kec. Kota Makmur, Kab. Aceh Utara, Aceh	Ikan Lele
16	Beuna Muda Mandiri	Titi Baro, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Aceh	Ikan Lele
17	Samudra	Meunasah Mesjid, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh	Ikan Lele
18	Usaha Maju	Lawe Pehidinen, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	Ikan Nila
19	Sumber Berkah Berseri	Limau Sundae, Kec. Binjai Barat, Kab. Binjai, Sumatera Utara	Ikan Nila
20	Bandar Mina	Bandar Senebah, Kec. Binjai Barat, Kab. Binjai, Sumatera Utara	Ikan Lele
21	Berkah Abadi Jaya	Payaroba, Kec. Binjai Barat, Kab. Binjai, Sumatera Utara	Ikan Nila
22	Rawang Rukun Sentosa	Rawang Lama, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan, Sumatera Utara	Ikan Lele
23	Rapi Jaya Bersama	Gambir Baru, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumatera Utara	Ikan Lele
24	Bina Mandiri	Limapuluh Kota, Kec. Limapuluh, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara	Ikan Nila
25	Budidaya Kolektif	Mandailing, Kec. Tebing Kota, Kab. Tebing Tinggi, Sumatera Utara	Ikan Lele
26	Muda Berjuang	Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kab. Tebing Tinggi, Sumatera Utara	Ikan Lele
27	Sehati	Sri Padang, Kec. Rambutan, Kab. Tebing Tinggi, Sumatera Utara	Ikan Lele



No	Kelompok Penerima	Lokasi	Komoditas
28	Giat Usaha	Alur Simerah, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, Aceh	Ikan Nila
29	Amanah I	Geuceu Komplek, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh	Ikan Lele
30	Amanah II	Lambung, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh	Ikan Nila
31	Garuda Muda Jaya	Karya Jaya, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Ikan Lele
32	Setaman	Karya Mulia, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kab. Prabumulih, Sumatera Selatan	Ikan Lele
33	Mina Mandiri	Siulak Kecil, Kec. Siulak, Kab. Kerinci, Jambi	Ikan Lele
34	Weling Fish Farm	Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara	Ikan Nila

Kelompok penerima sarana produksi bioflok untuk budi daya ikan nila dan lele dengan lokasi kelompok penerima tersebar pada beberapa daerah di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Sebanyak 20 kelompok penerima bantuan bioflok lele dan bioflok nila sebanyak 14 kelompok. Lokasi kelompok penerima sarana produksi bioflok tersebar pada beberapa daerah di provinsi Aceh (Aceh Besar; Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Pidie Jaya), Sumatera Utara (Asahan; Batubara, Binjai, Simalungun, Tebing Tinggi; dan Binjai), Sumatera Selatan (Palembang dan Prabumulih), Jambi (Kerinci), dan Jawa Barat (Bandung Barat).

Tabel 18. Perbandingan capaian sarana produksi bioflok yang disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (paket)	Realisasi (paket)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	80	81	101,25
2	BBPBAP Jepara	61	62	101,64
3	BBPBL Lampung	30	32	106,67
4	BPBAP Ujung Batee	33	34	103,03
5	BPBAT Sungai Gelam	47	47	100
6	BPBL Batam	10	10	100
7	BPBAP Situbondo	64	65	101,56
8	BPBAT Mandiangin	55	55	100
9	BPBAT Tatelu	25	25	100
10	BPBAP Takalar	27	27	100
11	BPBL Lombok	54	54	100
12	BPBL Ambon	48	48	100
13	BLUPPB Karawang	27	28	103,70

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 13 satker yang memiliki capaian sarana produksi bioflok terbesar yaitu satker BBPBL Lampung dengan capaian 106,67 %. Satker yang memiliki capaian terkecil yaitu BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBL Ambon, , BPBAT Sungai Gelam, BPBAT Mandiangin , BPBAT Tatelu, dan BPBAP Takalar yaitu sebesar 100 %. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada di posisi ke-3 dari 13 satker yang menjadi perbandingan dengan capaian 103,03 %.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut telah dilakukan yaitu identifikasi kendala yang mungkin terjadi, monitoring dan evaluasi kegiatan serta melanjutkan proses pembangunan sarana prasarana bioflok sehingga sukses diserahkan kepada kelompok penerima.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Perubahan petunjuk teknis bantuan sarana dan prasarana bioflok awal tahun menyebabkan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana mengalami sedikit keterlambatan. Perubahan petunjuk teknis tersebut terkait dengan ekatalog sarana prasana bioflok yang komprehensif mulai dari benih ikan, pakan ikan, obat ikan dan vitamin, sarana (kolam terpal, intalasi listrik/air/airasi, lantai, tiang, dan atap pelindung), peralatan perikanan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan akan dilakukan pendampingan lebih optimal secara *online* untuk memandu dan memastikan kelompok penerima melakukan kegiatan sesuai dengan SOP. Selanjutnya akan dilakukan pembagian wilayah binaan kepada anggota timja untuk mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan penerima bantuan dan penyuluh pendamping serta monev berkala (*offline* maupun *online*) terhadap kelompok penerima bantuan sehingga dapat mengetahui perkembangan dan progress yang berkesinambungan terhadap bantuan yang telah diberikan.

IK-7: Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan

Desiminasi teknologi pembesaran ikan merupakan suatu kegiatan interaktif dalam menyampaikan informasi teknologi budi daya perikanan pada lokasi yang telah ditentukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku pembudidaya perikanan untuk mendapatkan meningkatkan produksi. Capaian dari kegiatan ini dihitung berdasarkan persentase jumlah diseminasi teknologi yang telah disampaikan ke masyarakat dibandingkan dengan jumlah target kegiatan diseminasi teknologi sesuai perencanaan.

Tabel 19. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021 (Layanan)	2022	2023 (Unit)/(%)	Target (Orang)/(%)	Realisasi (Orang)/(%)	%	Target 2024 (Layanan)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	2,00	-	1,00	300,00	300,00	100,00	5	6.000,00
-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-

* Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d 2022 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pada tahun 2024, persentase jumlah diseminasi teknologi pembesaran ikan ke masyarakat sudah sepenuhnya selesai sesuai target sebanyak 100 %. Indikator capaian ini tidak dibandingkan dengan rencana strategis karena berbeda konsep dan satuan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Begitu juga tahun 2019, 2020, dan 2022 indikator ini belum diakomodir pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung



Anggaran diseminasi teknologi pembesaran ikan pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 300.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 299.958.601 (99,99 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi diseminasi teknologi pembesaran ikan maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99 %. Diseminasi teknologi pembesaran ikan yang dilakukan adalah penyampaian teknologi pembesaran ikan dengan sistem bioflok dan budi daya udang sistem kluster. Lokasi pelaksanaan diseminasi teknologi pembesaran ikan dilakukan di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut telah dilakukan yaitu identifikasi kendala yang mungkin terjadi, monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga diseminasi teknologi pembesaran ikan dapat dilaksanakan dan informasi tersampaikan kepada kelompok penerima.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kelompok penerima diseminasi teknologi pembesaran ikan merupakan pembudidaya pemula dalam penggunaan teknologi yang disampaikan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana tindak lanjut periode berikutnya yaitu diperlukan pendampingan bagi kelompok pembudidaya terkait kegiatan diseminasi teknologi yang telah dilakukan sehingga informasi yang telah diterima dapat memberikan pemahaman kepada kelompok pembudidaya untuk meningkatkan produksi budi daya.

4. SS-4: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya

IK-8: Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

Sasaran strategis yang ke lima dari BPBAP Ujung Batee ini merupakan wujud kepedulian balai terhadap pembudidaya ikan wilayah kerja dalam menjaga dan memelihara Kesehatan ikan dan lingkungan budi daya ikan. BPBAP Ujung Batee telah menyediakan pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan yang terdiri dari pengujian kualitas air, mikrobiologi dan biologi molekuler, selain itu juga melayani pengujian patologi, nutrisi pakan dan *antimicrobial resistance*. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan jumlah sampel (kualitas air, mikrobiologi, dan biologi molekuler) layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dibandingkan dengan target sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan. Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari monitoring internal BPBAP Ujung Batee maupun dari stakeholder eksternal.

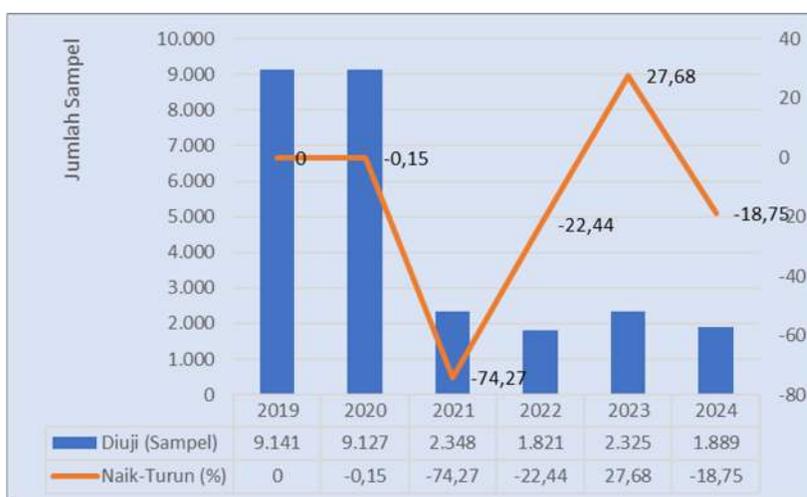
Tabel 20. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (sampel)	2020 (sampel)	2021 (sampel)	2022 (sampel)	2023 (sampel)	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	%	Target 2024 (sampel)	% Capaian 2024 terhadap 2024
9.141,00	9.127,00	2.348,00	1.821,00	2.325,00	1.328,00	1.889,00	142,24	3.350,00	56,39
-	-	-	-	149,04	100,00	142,24	142,24	-	-

* Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Realisasi target pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sudah melampaui sebesar 142,24% dari target 1.328 sampel. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahwa realisasi 2024 (1.889 sampel) lebih rendah dibanding pencapaian sampel pada tahun 2023 sebanyak 2.325 sampel namun lebih tinggi dibanding pencapaian pada tahun 2022 sebesar 1.821 sampel. Peningkatan capaian tahun ini disebabkan oleh adanya penerimaan sampel yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi volume output.



Gambar 14. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan tahun 2019-2024

Data *time series* menunjukkan pengujian sampel laboratorium cukup tinggi pada tahun 2019 dan 2020 sedangkan tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dan realokasi anggaran sehingga mempengaruhi volume output kegiatan pengujian sampel. Pada tahun 2023, pengujian sampel laboratorium meningkat dibandingkan tahun 2022 walaupun masih lebih rendah dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2024, pengujian sampel laboratorium mengalami penurunan kembali karena adanya pengurangan dan realokasi anggaran sehingga mempengaruhi output kegiatan pengujian sampel.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 428.358.000 dengan realisasi mencapai Rp 428.313.771 (99,98 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi pengujian kesehatan ikan dan

kualitas lingkungan maka dapat dikatakan penggunaan anggaran sangat efisien, karena realisasi output mencapai 142 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99 %.

Tabel 21. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan

Bulan	Kualitas Air (Kimia)	Mikrobiologi	Biologi Molekuler	Jumlah
Januari	157	29	15	201
Februari	149	27	15	191
Maret	203	25	39	267
April	33	4	19	56
Mei	77	15	36	128
Juni	48	9	34	91
Juli	69	57	48	174
Agustus	90	42	41	173
September	49	30	4	83
Oktober	125	36	53	214
November	90	36	46	172
Desember	78	40	21	139
Total	1.168	350	371	1.889

Adapun capaian pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan sampai dengan tahun 2024 ini dapat dilihat pada data di atas. Dari sejumlah 1.889 pelayanan pengujian sampel didominasi oleh sampel kualitas air sebanyak 1.168 sampel untuk pengujian kualitas air secara kimia diikuti dengan sampel molekuler (371 sampel) dan mikrobiologi (350 sampel).

Tabel 22. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

No	Satuan Kerja	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	1.918	7.166	373,62
2	BBPBAP Jepara	2.168	3.663	168,96
3	BBPBL Lampung	1.404	2.342	166,81
4	BPBAP Ujung Batee	1.338	1.889	142,24
5	BPBAT Sungai Gelam	783	1.837	234,61
6	BPBL Batam	926	1.401	151,30
7	BPBAP Situbondo	2.001	6.197	309,70
8	BPBAT Mandiangin	867	1.290	148,79
9	BPBAT Tatelu	782	1.029	131,59
10	BPBAP Takalar	1.530	4.580	299,35
11	BPBL Lombok	965	3.768	390,47
12	BPBL Ambon	801	2.241	279,78
13	BLUPPB Karawang	1.650	2.607	158
14	BPIU2K Karangasem	904	1.254	138,72
15	BPKIL Serang	4.315	8.687	201,32

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji capaian tertinggi diperoleh BPBL Lombok dengan capaian 390,47%, dan capaian terendah yaitu BPBAT Tatelu dengan capaian hanya sebesar 131,59%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada pada posisi ke-13 dari 15 satker dengan capaian sebesar 142,24%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III



Permasalahan pengujian sampel layanan Kesehatan ikan telah ditindaklanjuti dengan memaksimalkan proses pengujian setelah proses pengadaan bahan uji laboratorium selesai dilaksanakan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat pencapaian indikator ini. Selain itu beberapa peralatan laboratorium mulai tidak optimal lagi untuk dimanfaatkan, bahkan ada alat yang membutuhkan perawatan dan penggantian periperiferal.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Permasalahan keterbatasan sumber daya manusia akan dilakukan pengusulan pengadaan sumber daya manusia baik CPNS maupun PPPK menjadi salah satu alternatif mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu juga akan mengalokasikan anggaran untuk perawatan dan penggantian periperiferal peralatan laboratorium.

IK-9: Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR)

Pengendalian dan pengujian AMR (*Anti Microbial Resistance*) merupakan upaya pengendalian lingkungan melalui pengujian AMR yang telah dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Indikator ini bertujuan untuk mengendalikan bahaya cemaran residu yang dapat resistansi baik pada lingkungan maupun organisme akuatik agar tidak terjadi resistensi yang berasal dari residu kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan di wilayah kerja. Resistensi dapat timbul secara spontan melalui proses mutasi, selain itu gen dapat diwariskan secara vertikal atau dapat diperoleh dari bakteri lain secara horizontal melalui unsur genetik seluler seperti plasmid. Cara menghitung capaian kegiatan pengujian sampel ini adalah dengan menghitung jumlah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian AMR sesuai dengan laporan hasil uji.

Tabel 23. Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR)

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (sampel)	2020 (sampel)	2021 (sampel)	2022 (sampel)	2023 (sampel)	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	%	Target 2024 (sampel)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	-	35,00	56,00	35,00	37,00	105,71	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-
-	-	-	-	109,80	100,00	105,71	105,71	-	-

* Perjanjian Kinerja Tahun 2019 s.d 2021 indikator belum diakomodir, dan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 indikator menggunakan satuan %.

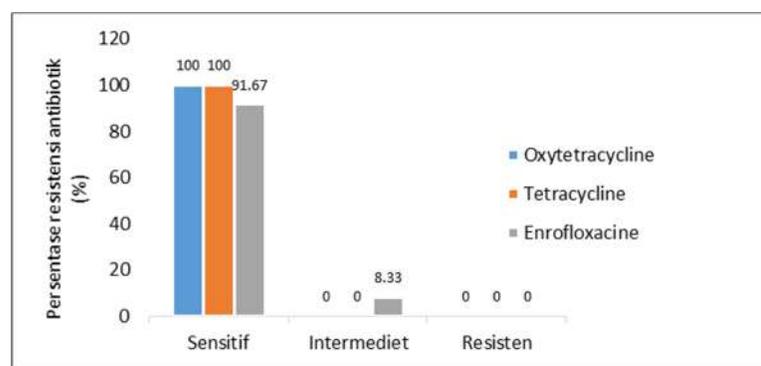
Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pengendalian dan pengujian AMR tercapai sebesar 105,71 % dari target 35 sampel. Indikator ini merupakan terobosan pada tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target tahun 2024. Jenis

sampel yang menjadi target kegiatan surveilan AMR tahun 2024 oleh Laboratorium BPBAP Ujung Batee adalah komoditas udang. Jenis udang budi daya yang diperoleh dalam kegiatan surveilan ini adalah vannamei. Dari total jumlah sampel hasil surveilan, sebagian besar sampel komoditas yang diperoleh adalah udang vannamei pada sistem pembesaran dan pembenihan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 31.075.000 dengan realisasi mencapai Rp 31.060.520 (99,95 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi pengujian sampel AMR maka dapat dikatakan penggunaan anggaran lumayan efisien, karena realisasi output mencapai 105,71 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,95 %.



Gambar 15. Persentase resistensi antibiotik

Hasil kegiatan surveilan AMR yang dilakukan sebanyak 37 sampel dan ditemukan 24 isolat *Vibrio parahaemolyticus* dari beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Ke duapuluh empat isolat yang teridentifikasi vibrio berasal dari udang budi daya pembesaran di tambak. Persentase resistensi isolat bakteri *V. parahaemolyticus* terhadap antibiotik menunjukkan bahwa kedua puluh empat isolat bakteri *V. parahaemolyticus* masih sensitif terhadap antibiotik Oxytetracycline dan Tetracycline (100 %). Persentase resistensi isolat bakteri *V. parahaemolyticus* terhadap antibiotik Enrofloxacin hanya 22 isolat yang bersifat sensitif (91,67 %) dan 2 isolat bersifat intermediet (8,33 %).

Tabel 24. Perbandingan capaian pengujian sampel antimikrobal resistan

No	Satuan Kerja	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	70	134	191,42
2	BBPBAP Jepara	70	155	221,42
3	BBPBL Lampung	59	86	145,76
4	BPBAP Ujung Batee	35	37	105,71
5	BPBAT Sungai Gelam	35	84	240
6	BPBL Batam	34	42	123,52
7	BPBAP Situbondo	56	70	125
8	BPBAT Mandiangin	35	50	142,85
9	BPBAT Tatelu	21	26	123,80
10	BPBAP Takalar	35	62	177,14



11	BPBL Lombok	35	44	125,71
12	BPBL Ambon	35	55	157,14
13	BLUPPB Karawang	56	58	103,57
14	BPIU2K Karangasem	35	40	114,29

Capaian pengujian sampel antimikrobal resistan terbesar yaitu 240 % oleh BPBAT Sungai Gelam, dan capaian terkecil diperoleh BLUPPB Karawang dengan capaian 103,57 %. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada di posisi ke-13 dari 14 satker dengan capaian 105,71%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut telah dilakukan yaitu memonitoring dan berkoordinasi dengan pihak terkait serta segera melakukan perjalanan pengambilan sampel untuk surveilan AMR.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Musim penghujan merupakan salah satu permasalahan dalam pencapaian indikator pengendalian dan pengujian AMR dikarenakan Masyarakat pembudidaya enggan untuk melakukan penebaran benih.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Pengalokasian anggaran untuk perjalanan pengambilan sampel dan bahan pengujian tidak tergabung lagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Keterbatasan sumber daya manusia akan dilakukan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat atau kursus khusus bidang pengujian AMR. Selain itu pengusulan pengadaan sumber daya manusia baik CPNS maupun PPPK menjadi salah satu alternatif mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.

5. SS-5: Meningkatkan kualitas pengendalian pakan dan obat ikan

IK-10: Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

Pengujian nutrisi dan mutu pakan ikan merupakan kegiatan pengujian laboratorium nutrisi pakan meliputi salah satu atau keseluruhan (lengkap) dari parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah sampel pakan ikan yang telah diuji dibandingkan dengan target sampel pakan sesuai perencanaan.

Tabel 25. Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (sampel)	2020 (sampel)	2021 (sampel)	2022 (sampel)	2023 (sampel)	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	%	Target 2024 (sampel)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	-	-	51,00	12,00	23,00	191,67	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-
-	-	-	-	124,39	100,00	191,67	191,67	-	-

* Perjanjian Kinerja Tahun 2019 s.d 2022 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Realisasi pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan tercapai sebesar 191,67 % dari target 12 sampel. Indikator capaian ini tidak dibandingkan dengan rencana strategis karena belum diakomodir dalam Rencana Strategis 2020-2024. Begitu juga tahun 2019-2022 indikator ini belum diakomodir pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 5.938.000 dengan realisasi mencapai Rp 5.937.120 (99,98 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi pengujian nutrisi/mutu pakan maka dapat dikatakan penggunaan anggaran lumayan efisien, karena realisasi output mencapai 191,67 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,98 %. Adapun capaian pengujian pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan sampai dengan tahun 2024 ini dapat terlihat pada data berikut:

Tabel 26. Pengujian pakan berdasarkan jenis sampel dan parameter uji

Bulan	Jenis Sampel			Parameter Uji				
	Pakan Ikan	Pakan Udang	Bahan Baku	Kadar Air	Kadar Abu	Kadar Lemak	Kadar Serat	Kadar Protein
Januari	-	3	-	3	3	3	-	-
Februari	2	-	6	8	8	8	-	-
Maret	2	1	-	1	2	2	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	2	-	-	2	2	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	4	-	3	1	1	5	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10	4	9	15	16	18	-	-
Total Sampel	23							

Hasil kegiatan pengujian pakan dan obat ikan untuk uji nutrisi dan mutu pakan, jenis sampel dari sejumlah 23 sampel pengujian didominasi oleh pakan ikan sebanyak 10 sampel diikuti dengan pakan udang (4 sampel) dan bahan baku (9 sampel). Parameter uji yang mendominasi adalah kadar lemak kemudian diikuti dengan kadar abu dan kadar air. Tidak terdapat sampel untuk parameter kadar serta dan kadar protein.

Tabel 27. Perbandingan capaian pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

No	Satuan Kerja	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)
1	BLU BBPBAP Jepara	70	121	172,86
2	BLU BPBAP Situbondo	58	120	206,9
3	BBPBAT Sukabumi	105	650	619,05
4	BPBAP Ujung Batee	12	23	191,67
5	BPBAP Takalar	12	21	175



6	BPBAT Sungai Gelam	12	48	400
7	BPBAT Mandiangin	12	19	158,33
8	BPBAT Tatelu	12	21	175
9	BBPBL Lampung	24	68	283,33
10	BLUPPB Karawang	12	30	250
11	BPKIL Serang	140	533	380,71

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian pakan ikan dan obat ikan yang di uji nutrisi dan mutu pakan dengan capaian terbesar 619,05 % yaitu satker BBPBAT Sukabumi. Capaian terkecil yaitu Satker BBPBAP Jepara dengan nilai 172,86 %. BPBAP Ujung Batee berada pada posisi 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) satker dengan capaian 191,67%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Permasalahan pada periode sebelumnya dalam pencapaian output telah ditindaklanjuti dengan memaksimalkan anggaran pada kegiatan lain dan memanfaatkan sisa bahan pengujian tahun sebelumnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kerusakan alat uji nutrisi dan mutu pakan sehingga tidak semua parameter uji dapat dilakukan. Selain itu juga tidak tersedia anggaran khusus perjalanan pengambilan sampel untuk pengujian nutrisi dan mutu pakan sehingga pencapaian indikator hanya sampling pasif yaitu menerima sampel yang masuk ke laboratorium untuk pemeriksaan uji nutrisi dan mutu pakan. Keterbatasan sumber daya manusia baik jumlah maupun kemampuan menjadi salah satu penghambat pencapaian indikator ini.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Mengalokasikan anggaran untuk perawatan dan penggantian periperal peralatan uji nutrisi dan mutu pakan. Peningkatan kemampuan pengujian analisis dengan mengikuti diklat atau kursus khusus bidang pengujian nutrisi dan mutu pakan serta pengusulan pengadaan sumber daya manusia baik CPNS maupun PPPK untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.

6. SS-6: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee

IK-11: Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi padapencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan



sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP untuk menilai sejauh mana implementasinya. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Itjen KKP melakukan evaluasi AKIP dengan mengacu pada aturan tersebut, yang dilaksanakan secara berjenjang.

Tabel 28. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	2023 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	73,58	94,27	97,94	73,50	82,00	83,30	101,59	85,00	98,00

* Pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 masih menggunakan nilai rekonsialisasi pengelolaan kinerja.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Nilai penilaian mandiri (PM) SAKIP merupakan indikator kinerja dengan target 82 dan realisasi 83,30 atau tercapai 101,59 %. Pada periode 2020-2022 setiap tahunnya terjadi peningkatan nilai dan melebihi target. Kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya melihat dari nilai rekonsiliasi kinerja dengan penilaian pada 5 aspek yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja, sehingga sulit untuk dibandingkan dengan capaian pada periode tahun 2024 maupun target pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024. Penilaian pada tahun 2024 ini pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id> dan inspektorat yang melakukan review dan penilaian atas dokumen-dokumen implementasi SAKIP pada periode tertentu.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	11.50	25.80
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	10.00	24.00
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	5.50	13.50
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	8.50	20.00
TOTAL		100.00	35.50	83.30
PREDIKAT			C	A

Gambar 16. Tangkapan layar LKE AKIP BPBAP Ujung Batee

Komponen “Pengukuran Kinerja” dan “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal” kurang maksimal dalam mencapai nilai indikator. Kedua komponen tersebut hanya mencapai bobot 24 dari 30 (80 %) dan bobot 20 dari 25 (80 %). Setelah ditelusuri lebih detail bahwa sub komponen “Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien” belum maksimal dilaksanakan hanya mendapat nilai 10,5 dari bobot 15 atau 70 %, begitu juga dengan sub komponen “Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja” belum maksimal dilaksanakan hanya mendapat nilai 7,5 dari bobot 12,5 atau 60 %.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena hasil kinerja seluruh kegiatan akan mendukung aspek penilaian, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek penilaian dan secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian indikator.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi daya Nomor B.4948/DJPB.1/HP.440/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 17. Nilai PM SAKIP unit pelaksana teknis Ditjen PB

Berdasarkan gambar grafik terlihat bahwa hanya satu UPT memperoleh predikat BB (Sangat Baik: nilai > 70 – 80), sedangkan 14 UPT lainnya memperoleh predikat A (Memuaskan: 80 – 90). Nilai PM SAKIP tertinggi diperoleh BPIU2K Karangasem mencapai 84,3 dan terendah BBPBAT Sukabumi hanya sebesar 78,25, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 83,3 berada diposisi ke-3 dari 15 UPT. Dengan demikian seluruh UPT telah melaksanakan SAKIP dengan baik tidak ada UPT yang cukup atau kurang menerapkan SAKIP.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan identifikasi yang berpotensi besar menjadi penghambat nilai PM SAKIP tidak maksimal yaitu:

1. Pengukuran kinerja belum optimal dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
2. Pelaporan Kinerja belum optimal memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
3. Implementasi SAKIP belum optimal meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan harapan memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami adalah kurangnya personil tim kinerja yang aktif mendokumentasi dan melaporkan kegiatan dalam pencapaian kinerja, sehingga menyebabkan penyelesaian dokumen kinerja membutuhkan waktu yang lama. Selain itu kurangnya pemahaman personal tim kinerja tentang SAKIP menjadi penghambat dalam pelaporan kinerja.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Beberapa rencana aksi yaitu 1) meningkatkan keaktifan personil tim kinerja dalam pemenuhan dokumen-dokumen kinerja; 2) pimpinan lebih berperan aktif memonitor, mengevaluasi, dan mengambil tindakan dalam pelaksanaan SAKIP; dan 3) meningkatkan pemahaman personal tim kinerja tentang SAKIP melalui diklat maupun pendampingan secara langsung dari eselon I.

IK-12: Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budi daya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Tabel 29. Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	-	-	81,36	91,00	86,96	95,56	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator mulai diakomodir tahun 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee telah tercapai dengan nilai sebesar 81,36 % atau 101,7 % dari target tahunan yang ditetapkan. Indikator kinerja ini mulai diakomodir di tahun anggaran 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak adanya anggaran khusus yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini karena kegiatan ini bersifat administratif penginputan data pada aplikasi KUSUKA. Beberapa kegiatan seperti bantuan benih, calon induk, bioflok, dan kincir secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut atas rencana aksi pada periode sebelumnya ialah telah dilakukan penginputan data pelaku usaha pada aplikasi KUSUKA.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami dalam penginputan data pelaku usaha ini masih ada beberapa anggota/pokdakan yang belum memiliki kartu KUSUKA, hal ini menyebabkan capaian kegiatan ini belum optimal.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode pelaporan selanjutnya yaitu akan membantu dan memonitoring penginputan data pelaku usaha (KUSUKA) pada laman satu data KKP. Akan mengoptimalkan personil kerja dalam melakukan penginputan data pelaku usaha pada aplikasi KUSUKA.

IK-13: Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Standar profesional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi, menggambarkan tingkat atau jenjang Pendidikan; 2) Kompetensi, menggambarkan kemampuan; 3) Kinerja, menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai; dan 4) Disiplin, menggambarkan kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan latihan, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. SDM yang berintegritas dan berkompotensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*) dan kapasitas (*skill*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Tabel 30. Indeks profesionalitas ASN

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Indeks)	2020 (Indeks)	2021 (Indeks)	2022 (Indeks)	2023 (Indeks)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Target 2024 (Indeks)	% Capaian 2024 terhadap 2024
48,94	80,81	75,23	81,62	88,88	85,00	86,32	101,55	76,00	113,58

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPAP Ujung Batee tahun 2024 mampu mencapai 86,32 atau tercapai 101,55 % dari target 85. Capaian IP ASN di tahun 2024 lebih tinggi dibanding capaian pada durasi tahun 2019 s.d 2022 namun lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2023. Dalam kurun waktu 2019 s.d 2024 terlihat IP ASN BPAP Ujung Batee mengalami naik turun, capaian tertinggi berada pada tahun 2023 dan capaian terendah pada tahun 2019.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2024, alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar Rp 170.071.000 dengan realisasi Rp 170.069.348 (99,99 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi indeks profesionalitas ASN maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output sebesar 101,55 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,99 %.

Indeks Profesionalitas ASN Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi daya Nomor

B.262/DJPB.1/KP.720/I/2025 tanggal 13 Januari 2025, hal Capaian IKU IP-ASN Semester II Tahun 2024 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 18. Indeks profesionalitas ASN unit pelaksana teknis

Indeks profesionalitas ASN predikat Sangat Tinggi (nilai 91-100) diperoleh BPBAT Sungai Gelam, sedangkan sisanya predikat Tinggi (nilai 81 – 90) diperoleh UPT lainnya. Indeks profesionalitas ASN tertinggi yaitu 91,02 oleh BPBAT Sungai Gelam, kemudian terendah yaitu 84,3 oleh BPKIL Serang, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 86,32 berada diposisi ke-11 dari 15 UPT. Dengan demikian seluruh UPT memiliki profesionalitas ASN yang tinggi, tidak ada UPT yang memiliki cukup atau kurang profesionalitas ASN.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Kendala pencapaian target indikator ini pada triwulan IV yaitu masih minim pegawai mendapatkan Diklat 20 JP. Beberapa diklat 20 JP yang tersedia hanya dapat diikuti sebagian kecil pegawai. Kendala-kendala tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat pendampingan dan workshop penyusunan dokumen WBK/WBBM. Selain itu pegawai juga didorong untuk mengikuti berbagai diklat secara online dan mandiri dari beberapa instansi yang menyediakan pelatihan, seperti melalui e-Milea dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenkeu Learning Center (KLC) dari Kementerian Keuangan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Masih ada pimpinan yang belum Diklat PIM, sedangkan keikutsertaan pimpinan dalam Diklat PIM sangat terbatas. Kemudian masih ada beberapa pejabat fungsional tertentu yang belum mengikuti diklat fungsional, dan diklat fungsional itu sendiri tidak sepanjang waktu tersedia ditambahkan ketersediaan anggaran untuk mengikuti diklat fungsional. Selanjutnya untuk mencapai indeks profesionalitas ASN sebesar 80 harus semua pegawai memenuhi komponen Dimensi Kompetensi, terutama komponen Diklat 20 JP dan Seminar.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rekomendasi atas rencana aksi ke depan yaitu 1) mengidentifikasi komponen-komponen pembentuk IP-ASN yang masih rendah di periode sebelumnya, 2) identifikasi kebutuhan diklat PIM dan diklat fungsional, dan segera menyampaikan usulan dan rencana diklat tersebut ke eselon I, serta secara berkala melakukan koordinasi dan komunikasi tentang diklat-diklat tersebut; 3) mengalokasikan anggaran yang optimal untuk pelaksanaan diklat.

IK-14: Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPAP Ujung Batee

Indeks pengelolaan kepegawaian adalah merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup BPAP Ujung Batee. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma). Pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

Tabel 31. Indeks pengelolaan kepegawaian

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Indeks)	2020 (Indeks)	2021 (Indeks)	2022 (Indeks)	2023 (Indeks)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Target 2024 (Indeks)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	-	-	6,00	4,00	3,00	75,00	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator mulai diakomodir tahun 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa kegiatan ini telah tercapai dengan nilai indeks sebesar 6 atau 200 % dari target tahunan yang ditetapkan. Indikator kinerja ini mulai diakomodir pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung



Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena hasil kinerja seluruh kegiatan akan mendukung aspek penilaian, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek penilaian. Pengelolaan kepegawaian secara tidak langsung didukung anggaran perangkat pengolah data dan komunikasi, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM, yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

Indeks pengelolaan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.260/DJPB.1/KP.810/I/2025 tanggal 13 Januari 2025, hal Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Aparatur, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Indeks pengelolaan kepegawaian unit pelaksana teknis

Satker	Komponen Indeks					Jumlah	Predikat	Level
	Usul Kebutuhan	Data Diklat	Layanan Mutasi	Layanan Kesejahteraan	Informasi Kepegawaian			
BPBAT Sungai Gelam	10	15	20	20	20	77,5	Di Bawah Rata-rata	2
BPBAP Ujung Batee	18	15	10	20	20	83	Rata-rata	3
BPIU2K Karangasem	16	15	19	29	29	81	Rata-rata	3
BPKIL Serang	13,33	15	10	20	20	78,83	Di Bawah Rata-rata	2
BLUPPB Karawang	7,71	15	12,5	20	20	75,21	Di Bawah Rata-rata	2
BPBAT Tatelu	16	15	10	20	20	81	Rata-rata	3
BBPBAP Jepara	20	15	20	20	20	95	Baik	5
BPBAP Takalar	12,73	25	17,85	20	20	85,58	Di Atas Rata-rata	4
BBPBAT Sukabumi	13,33	15	17,85	20	20	86,18	Di Atas Rata-rata	4
BPBAT Mandiangin	20	15	10	20	20	85	Rata-rata	3
BPBL Batam	16,67	15	10	20	20	81,67	Rata-rata	3
BPBL Lombok	13,33	15	10	20	20	80,33	Rata-rata	3
BPBL Ambon	8,75	15	12,5	20	20	76,25	Di Bawah Rata-rata	2
BBPBL Lampung	18,09	15	16,67	20	20	89,76	Di Atas Rata-rata	4
BPBAP Situbondo	20	15	16,67	20	20	91,67	Baik	5

Indeks pengelolaan kepegawaian predikat Sangat Baik (nilai 96-100, level 6) belum ada satu pun UPT memperolehnya. Sementara predikat Baik (nilai 91-95, level 5) diperoleh 2 UPT, selanjutnya predikat Di Atas Rata-rata (nilai 86-90, level 4) sebanyak 3 UPT, predikat Rata-rata (nilai 81-85, level 3) sebanyak 6 UPT, dan predikat Di Bawah Rata-rata (nilai 76-80, level 2) sebanyak 4 UPT. BPBAP Ujung Batee dengan nilai indeks level 3 dengan nilai 83 berada pada peringkat ke-7 dari 15 UPT. Dengan demikian seluruh UPT telah melaksanakan pengelolaan kepegawaian sesuai ekspektasi karena nilai indeks terendah pada level rata-rata sesuai target yaitu level indeks 3.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut atas rencana aksi periode pelaporan sebelumnya ialah telah dilakukan kegiatan pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan yakni berupa pengelolaan absensi, perhitungan tunjangan kinerja, update data pegawai, proses kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami pada periode ini adalah tidak tersedianya pejabat fungsional pengelola kepegawaian di BPBAP Ujung Batee, sehingga kegiatan kepegawaian ini dirangkap oleh pejabat fungsional yang lain.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan yang dilakukan perlunya pengusulan keikutsertaan pegawai dalam diklat kepegawaian dan pengusulan penambahan pegawai jabatan fungsional kepegawaian. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode pelaporan selanjutnya yaitu tetap melakukan kegiatan pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-15: Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah suatu predikat yang diperoleh satker yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Predikat WBK merupakan status yang dapat disandang oleh unit kerja yang telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang transparan, bebas pungutan liar, dan mampu dipertanggungjawabkan secara berkala. Target unit kerja berpredikat WBK merupakan target yang diberikan kepada beberapa satuan kerja yang telah memiliki status WBK untuk dipertahankan dalam siklus 2 tahunan atau kepada unit kerja yang dipersiapkan untuk menjadi unit kerja bersertifikat WBK. Target ini dapat dinyatakan berhasil saat predikat yang telah diperoleh mampu dipertahankan oleh unit kerja.

Tabel 33. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK



Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	2023 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	-	-	79,47	76,00	79,47	104,57	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator mulai diakomodir tahun 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Hasil penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK sebesar 79,47 atau tercapai 104,57 % dari target 76. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pembangunan zona integritas ini mulai tahun 2023 merupakan tahun pertama penilaian yang telah dicanangkan sejak tahun 2022. Begitupun pada Rencana Strategis BPAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena hasil kinerja seluruh kegiatan akan mendukung aspek penilaian, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek penilaian. Kegiatan yang dilaksanakan pada pencapaian indikator ini diantaranya ialah area I manajemen perubahan; area II Penataan tata laksana; area III penataan sistem manajemen SDM; area IV penguatan akuntabilitas; area V penguatan pengawasan; dan area VI peningkatan kualitas pelayanan publik. Faktor pendorong internal keberhasilan indikator ini berupa tingginya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai BPAP Ujung Batee untuk mewujudkan zona integritas WBK; kerja sama yang solid dalam tim WBK; kerja sama antara tim WBK dan seluruh komponen; dan tersedianya anggaran pendukung untuk WBK dalam RKA/K-L BPAP Ujung Batee. Faktor pendorong eksternal keberhasilan IKU ini adanya pembinaan dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana KKP; adanya pembinaan dan pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP; dan adanya pembinaan dari Kementerian lain misalnya BKN dan KemenpanRB.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut rencana aksi triwulan sebelumnya telah dilaksanakan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi zona integritas pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini perlunya peningkatan inovasi pelayanan publik di BPAP Ujung Batee.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi untuk triwulan berikutnya; a) peningkatan peran serta seluruh pegawai dalam mempertahankan predikat WBK dan penilaian WBK tingkat Nasional; b)



peningkatan sarana dan prasarana layanan publik; c) perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penilaian WBK tingkat nasional dari TPN (tim Penilai Nasional MENPAN RB).

IK-16: Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee

Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budi daya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budi daya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online. Kegiatan pendukung untuk mencapai indikator kinerja ini adalah pengumpulan dan pengolahan isu publik tentang pemberitaan dari media sosial yang mengunggah pemberitaan tentang KKP kemudian mengidentifikasi sifat pemberitaan (positif, negatif atau netral), serta membuat rekapitulasi.

Tabel 34. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya wilayah kerja BPBAP Ujung Batee

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	2023 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	-	-	100,00	86,00	100,00	116,28	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator mulai diakomodir tahun 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Terlihat pada tabel di atas bahwa sampai dengan akhir 2024 telah dilakukan perhitungan capaian dengan angka capaian 100 % atau 116,28 % dari target tahun 2024, hal ini menandakan bahwa selama kurun waktu tahun anggaran 2024 ini tidak ditemukan adanya pemberitaan yang bersifat negatif terkait BPBAP Ujung Batee tahun 2024. Indikator kinerja ini mulai diakomodir pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

**Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III**

Sudah dilakukan tindak lanjut dengan memperbanyak pemberitaan positif pada tahun berikutnya sehingga target depan akan lebih baik lagi.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Rekapitulasi pemberitaan hanya mengandalkan mesin pencarian Google, di mana pencarian berita harus klik satu persatu hasil pencarian kata kunci. Cukup banya berita yang isi sama persis tetapi dipublis media yang berbeda-beda. Ada potensi yang cukup tinggi, bahwa berita sub sektor perikanan budi daya di wilayah kerja BPBAP Ujung Batee yang tidak diketahui.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi akan dilakukan pada periode yang akan datang adalah tetap melakukan kegiatan monitoring hasil pemberitaan baik internal maupun eksternal.

IK-17: Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee

Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee merupakan persentase penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas BPBAP Ujung Batee sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh BPBAP Ujung Batee. Kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan.

Tabel 35. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	97,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Tahun 2018 s.d 2019 indikator menggunakan nilai temuan.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pada Tahun 2024, realisasi presentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas satker BPBAP Ujung Batee adalah 100,00%. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada temuan maka dianggap tuntas semua penyelesaian semua temuan karena tidak ada temuan. Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan sistem pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh BPBAP Ujung Batee sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2024, yaitu: 1) Memenuhi permintaan dokumen BPK; dan 2) Melakukan tindak lanjut penyelesaian atas LHP BPK.

Indikator ini mulai diakomodir pada perjanjian kinerja tahun 2020, sehingga belum dapat diperbandingkan untuk tahun 2018 dan 2019. Sejak tahun 2020, data *time series* menunjukkan bahwa adanya perbaikan tindak lanjut penyelesaian LHP BPK oleh BPBAP Ujung, hal ini dapat dilihat dari tahun 2020 tindak lanjut penyelesaian hanya 97,64 %, kemudian tahun 2021 s.d 2023 mampu tuntas ditindaklanjuti menjadi 100 %.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena pelaksanaan anggaran seluruh kegiatan akan menjadi aspek pemeriksaan, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek pemeriksaan.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.142/DJPB.1/KU.130/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI, bahwa unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya penyelesaian yaitu sebanyak 15 UPT telah menyelesaikan, menindaklanjuti, dan menuntaskan rekomendasi LHP BPK.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

BPBAP Ujung Batee telah mengidentifikasi yang mungkin menjadi temuan BPK. Kemudian memastikan semua kegiatan dari perencanaan sampai pembayaran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Tidak mengalami permasalahan pada tahun 2023, namun memastikan semua kegiatan dari perencanaan sampai pembayaran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan melakukan indentifikasi dan mitigasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh BPBAP Ujung Batee pada periode-periode selanjutnya adalah dengan mempertahankan komitmen untuk segera melakukan tindak



lanjut atas penyelesaian LHP BPK dan meningkatkan komunikasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dengan harapan memiliki persepsi yang sama atas LHP yang diberikan ke BPAP Ujung Batee.

IK-18: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPAP Ujung Batee

Persentase pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPAP Takalar yang menjadi objek pengawasan. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan dalam satuan persen (%).

Tabel 36. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	22,22	92,00	100,00	96,43	80,00	100,00	125,00	85,00	117,65

* Tahun 2019 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Capaian telah terealisasi 100 % atau 125 % dari target tahunan, capaian ini diperoleh dikarenakan sampai dengan periode akhir tahun anggaran 2024 ini saran dan rekomendasi Inspektorat Jenderal telah selesai ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja. Dibandingkan dengan target rencana jangka menengah yang tertuang pada Rencana Strategis BPAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 117,65 %. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya (2020-2024) terlihat mengalami naik turun, periode 2020 s.d 2022 mengalami peningkatan sementara pada tahun 2023 tidak mencapai seratus persen.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena pelaksanaan anggaran seluruh kegiatan akan menjadi aspek



pengawasan, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek pengawasan dan perbaikan kinerja.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.102/DJPB.1/HP.620/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan IV Tahun 2024, bahwa BPBAP Ujung Batee memiliki beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan sampai dengan Desember 2024 telah ditindaklanjuti semua rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Upaya tindak lanjut permasalahan triwulan sebelum sudah dilakukan dengan memastikan semua kegiatan dari perencanaan sampai pembayaran sesuai ketentuan. Terus berusaha untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan, beserta bukti-bukti dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala dalam melaksanakan pencapaian indikator ini adalah pemahaman dan penerjemahan temuan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga terkadang terjadi perbedaan persepsi antara auditor dengan penanggung jawab kegiatan lingkup BPBAP Ujung Batee.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh BPBAP Ujung Batee pada periode-periode selanjutnya adalah dengan mempertahankan komitmen untuk segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan guna perbaikan kinerja dan meningkatkan komunikasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dengan harapan memiliki persepsi yang sama atas temuan atau rekomendasi yang diberikan ke BPBAP Ujung Batee. Selain itu, dengan adanya aplikasi SIDAK KKP, memudahkan BPBAP Ujung Batee dalam memantau dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tersebut.

IK-19: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (1) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM



yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (2) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP), penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Tabel 37. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	2023 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2024 terhadap 2024
93,45	88,57	92,29	91,49	87,62	93,76	96,02	102,41	92,00	104,37

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2024 ini sebesar 96,76 atau tercapai 102,41 % dari target sebesar 93,76. Pencapaian tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan adanya perbaikan-perbaikan pelaksanaan anggaran pada beberapa komponen penilaian. Data time series nilai IKPA BPAP Ujung Batee mengalami fluktuasi, di mana capaian IKPA tertinggi pada 2024 sebesar 96,02 kemudian tahun 2019 mencapai sebesar 93,45 terendah pada tahun 2023 hanya sebesar 87,62 dan 2020 sebesar 88,57.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

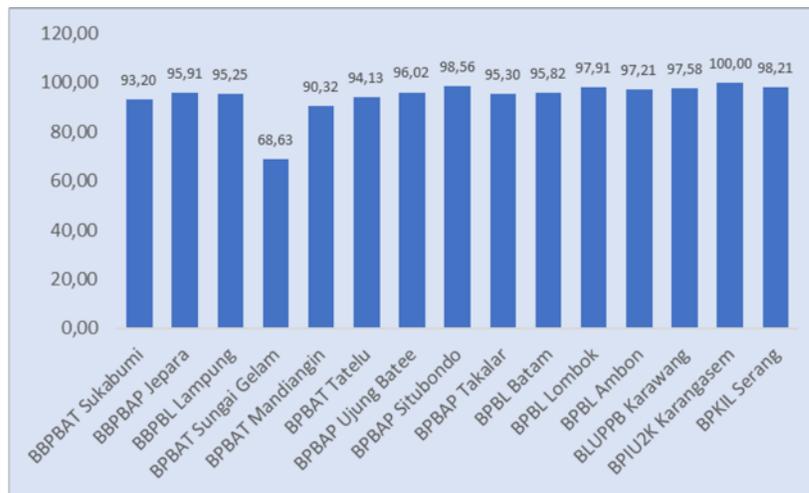
Pada rencana kerja anggaran tahun 2024 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian IKPA, karena perencanaan/pelaksanaan/output seluruh anggaran kegiatan akan menjadi aspek perhitungan IKPA. Berikut ini hasil penilaian IKPA berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan pada akhir periode tahun 2024.

Tabel 38. Rincian bobot IKPA

	Perencanaan		Pelaksanaan				Kualitas Hasil	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Hal.III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Nilai	100,00	77,23	99,54	100,00	100,00	95,26	100,00	96,02
Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Akhir	10,00	11,58	19,91	10,00	10,00	9,53	25,00	
Nilai Aspek	88,62		98,70				100,00	

Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menjadi terendah dalam membentuk nilai bobot diantara beberapa lainnya. 1) Deviasi Halaman III DIPA hanya mencapai nilai akhir 11,58 dari bobot 15, hal ini terjadi karena rencana penarikan dana yang terdapat pada Halaman III DIPA sering mengalami deviasi terlalu tinggi (selisih antara rencana penarikan dana dengan realisasi penerikan dana). 2) Penyerapan Anggaran hanya mencapai nilai akhir 19,91 dari bobot 20, hal ini terjadi karena

penyerapan anggaran per jenis belanja per triwulan masih ada selisihnya dengan target serapan anggaran per jenis belanja per triwulan.



Gambar 19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) unit pelaksana teknis Unit pelaksana teknis memperoleh IKPA sempurna yaitu BPIU2K Karangasem yaitu 100, sedangkan IKPA terendah pada BPBAT Sungai Gelam hanya sebesar 68,63. BPBAP Ujung Batee dengan nilai 96,02 berada peringkat ke-7 tertinggi dari 15 UPT. Sesuai target sebesar 93,76 bahwa ada 3 UPT yang tidak mencapai target yaitu BBPBAT Sukabumi, BPBAT Sungai Gelam, dan BPBAT Mandiangin.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan dengan lebih cermat menyusun Rencana Penarikan Dana dengan memperhatikan estimasi serapan anggaran, dan rencana tindak lanjut yaitu melakukan revisi Halaman III DIPA dengan lebih cermat mengestimasi serapan anggaran. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian komponen IKPA yang masih rendah untuk segera dilakukan perbaikan bulan berikutnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Walaupun sudah dilakukan penyusunan rencana penarikan dana lebih cermat dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tetapi deviasi Halaman III DIPA tetap tinggi, sehingga tetap menjadi permasalahan dalam pencapaian IKPA yang maksimal. Dapat diidentifikasi kendala pencapaian indikator ini yaitu 1) rencana penarikan dana dalam hal ini belanja barang dari pelaksana kegiatan sering tidak akurat, sering berubah-ubah sehingga perbandingan (deviasi) Halaman III DIPA terlalu besar baik minus ataupun plus; 2) Ditambah lagi revisi rencana penarikan dana yang diperhitungkan oleh sistem SPAN hanya per triwulan sebelum tanggal 15 bulan berikut, sehingga ketika ada revisi pada



pertengahan triwulan tidak dianggap ada perubahan rencana penarikan dana tetap mengacu rencana penarikan dana triwulan sebelumnya.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Lebih cermat lagi menyusun rencana penarikan dana dengan memperhatikan estimasi serapan anggaran, lebih sering berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dan memberikan pemahaman lebih tentang rencana penarikan dana bagi kinerja organisasi. Selain itu lebih ketat lagi dalam monitoring dan evaluasi capaian komponen IKPA yang masih rendah untuk segera dilakukan perbaikan bulan berikutnya.

IK-20: Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPAP Ujung Batee

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

Tabel 39. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	73,25	76,21	78,10	80,00	88,90	111,13	75,00	118,53

* Tahun 2019-2020 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2024 sebesar 88,90 atau tercapai 111,13 % dari target sebesar 80. Capaian indikator ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan di mana tahun 2021 tingkat kepatuhan hanya mencapai sebesar 73,25

selanjutnya meningkat tahun 2022 menjadi sebesar 76,21, kemudian tahun 2023 meningkat lagi menjadi 78,10 dan terakhir tahun 2024 mampu mencapai 88,90. Pencapaian ini jika dibandingkan rencana strategis 2024 sudah melampaui sebesar 118,53 % dari target hanya 75. Tahun 2019 sampai dengan 2020 indikator ini belum diakomodir dalam perjanjian kinerja. Indikator ini merupakan indikator terobosan mulai diakomodir pada tahun 2021.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2024 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN. Berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.235/DJPB.1/TU.210/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal IKU Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024, seperti berikut.



Gambar 20. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada UPT

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada UPT berkisar antara 84-89. Tingkat kepatuhan terendah sebesar 84 pada BPBAP Situbondo dan tertinggi sebesar 89,8 pada BBPBL Lampung dan BLUPPB Karawang, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 88,9 berada pada peringkat ke-3 tertinggi dari 15 UPT.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan pengidentifikasian yang mungkin menjadi penghambat pencapaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN, selain itu juga dilakukan peningkatan ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan BMN.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami dalam merealisasikan kegiatan ini adalah sumber daya manusia di bidang keuangan dan akuntansi masih terbatas.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya



Penambahan sumber daya manusia yang lebih kompeten, baik melalui diklat di bidang akuntansi dan keuangan maupun rekrutmen PNS atau PPPK dengan kompetensi bidang keuangan dan akuntansi.

IK-21: Nilai kinerja perencanaan anggaran BPAP Ujung Batee

Nilai kinerja anggaran merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu program. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup BPAP Ujung Batee diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) e-monev anggaran Kementerian Keuangan RI.

Tabel 40. Nilai kinerja perencanaan anggaran

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	2023 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2024 terhadap 2024
	25,16	80,14	85,90	85,68	71,00	75,00	105,63	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Tahun 2019 indikator belum diakomodir dalam PK, tahun 2020-2023 menggunakan nilai kinerja anggaran.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Nilai kinerja anggaran tahun 2024 sebesar 75 atau tercapai sebesar 105,63 % dari target sebesar 75. Pencapaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun rencana strategis tahun 2020-2024 karena masih menggunakan nilai kinerja anggaran sedangkan tahun 2024 sudah menggunakan nilai kinerja perencanaan anggaran. Data time series nilai kinerja anggaran mengalami fluktuasi, di mana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai sebesar 85,90 dan terendah pada tahun 2020 hanya sebesar 25,16, sementara untuk tahun 2019 data tidak tersedia karena pada saat itu nilai kinerja anggaran tidak diakomodir dalam perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2024 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian nilai kinerja anggaran, karena perencanaan/pelaksanaan/output seluruh anggaran kegiatan akan menjadi komponen pembentuk nilai kinerja anggaran.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan dengan lebih cermat menyusun Rencana Penarikan Dana dengan memperhatikan estimasi serapan anggaran, dan rencana tindak lanjut yaitu melakukan revisi Halaman III DIPA dengan lebih cermat mengestimasi serapan anggaran. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian variabel efisiensi yang masih rendah untuk segera dilakukan perbaikan bulan berikutnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Walaupun sudah dilakukan penyusunan rencana penarikan dana lebih cermat dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tetapi efisiensi masih rendah, sehingga tetap menjadi permasalahan dalam pencapaian yang maksimal. Dapat diidentifikasi kendala pencapaian indikator ini yaitu rencana penarikan dana dari pelaksana kegiatan sering tidak akurat, sering berubah-ubah sehingga perbandingan (deviasi) antara rencana penarikan dana dengan output terlalu besar baik minus ataupun plus.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Lebih cermat lagi menyusun rencana penarikan dana dengan memperhatikan estimasi serapan anggaran, lebih sering berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dan memberikan pemahaman lebih tentang rencana penarikan dana bagi kinerja organisasi. Selain itu lebih ketat lagi dalam monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja yang masih rendah untuk segera dilakukan perbaikan bulan berikutnya.

IK-22: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun.

Definisi pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak serumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor non pemerintah, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

Tabel 41. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa

Realisasi 2019-2024					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	73,25	76,21	82,35	80,00	81,64	102,05	75,00	108,85

* Tahun 2018-2020 indikator belum diakomodir.

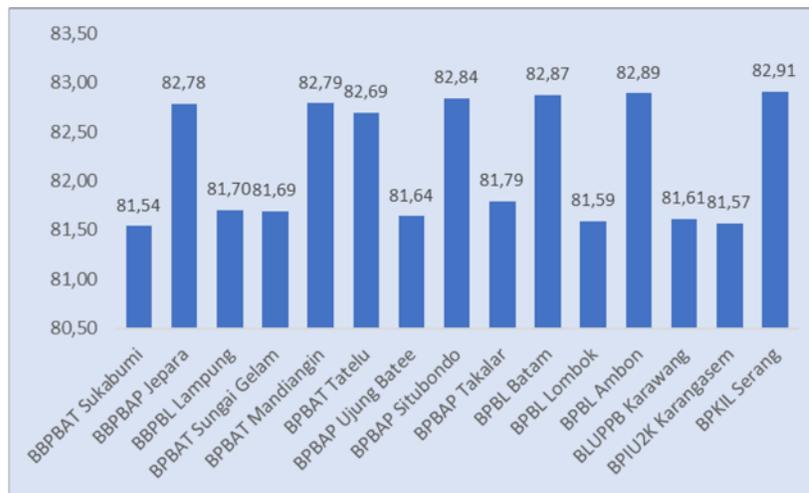
Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa tahun 2024 sebesar 81,64 atau tercapai 102,64 % dari target sebesar 80. Pencapaian ini jika dibandingkan target rencana strategis 2020-2024 telah melampaui target sebesar 108,85 % dari target 75. Data *time series* terlihat bahwa tingkat kepatuhan mengalami tren meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 tingkat kepatuhan hanya sebesar 73,25 kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 76,21 dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 82,35, dan capaian ini sebagai *all time high* (ATH)

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2024 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian tingkat kepatuhan. Pelaksanaan anggaran seluruh kegiatan tidak terlepas dari pengadaan barang/jasa, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi komponen perhitungan Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.169/DJPB.1/TU.210/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tingkat Kepatuhan PBJ Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya TA. 2024, seperti berikut.



Gambar 21. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada UPT

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada UPT berkisar antara 81-82 % tidak ada perbedaan yang signifikan, cenderung sama, hanya angka di belakang koma yang menjadi pembeda. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa terendah sebesar 81,54 pada BBPBAT Sukabumi, dan tertinggi sebesar 82,91 pada BPKIL Serang, sedangkan BPBAP Ujung Batee sebesar 81,64 berada pada peringkat ke-11 tertinggi dari 15 UPT.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan pengidentifikasian yang mungkin menjadi penghambat pencapaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa, selain itu juga dilakukan peningkatan

ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan barang/jasa.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Tidak ada kendala berarti merealisasikan kegiatan ini, hanya perlu ditingkatkan koordinasi antara tim pengadaan, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, biro umum selaku unit kerja pengadaan barang/jasa, bahkan inspektorat jenderal mengingat administrasi mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan semakin kompleks, banyak dokumen dan ketentuan yang harus diperhatikan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi pada periode berikutnya akan ditingkatkan koordinasi antara tim pengadaan, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, biro umum selaku unit kerja pengadaan barang/jasa, bahkan inspektorat jenderal mengingat administrasi mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan semakin kompleks, banyak dokumen dan ketentuan yang harus diperhatikan.

IK-23: Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Tabel 42. Nilai pengawasan kearsipan

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	2023 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	-	-	68,75	75,00	82,94	110,59	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Tahun 2019-2022 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Nilai pengawasan kearsipan tahun 2024 sebesar 82,94 atau tercapai 110,59 % dari target sebesar 75. Indikator kinerja ini mulai diakomodir pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir sehingga belum dapat dibandingkan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2024 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan.



Gambar 22. Pengawasan kearsipan pada UPT

Pengawasan kearsipan dinilai beberapa aspek tidak hanya pengelolaan kearsipan tetapi sampai kepada SDM dan infrastruktur kearsipan, sehingga nilai pengawasan kearsipan secara tidak langsung didukung anggaran perangkat pengolah data dan komunikasi, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM, layanan umum.

Berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.258/DJPB.1/TU.140/I/2025 tanggal 12 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024, seperti gambar di atas. Pengawasan kearsipan pada UPT berkisar antara 69,85-97,81. Pengawasan kearsipan terendah sebesar 69,85 (predikat B kategori Baik) pada BPBL Ambon dan tertinggi sebesar 97,81 (predikat AA kategori Sangat Memuaskan) pada BPBAT Sungai Gelam, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 82,94 (predikat A kategori Memuaskan) berada pada peringkat ke-9 dari 15 unit pelaksana teknis. Dengan demikian seluruh unit pelaksana teknis telah melaksanakan kearsipan dengan baik tidak ada yang cukup maupun kurang.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan pengidentifikasian yang mungkin menjadi penghambat pencapaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa, selain itu juga dilakukan peningkatan ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan barang/jasa.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami pada periode ini adalah minimnya personil kerja yang mengerti akan tata kearsipan dan sarana prasarana arsip yang terbatas menjadikan kegiatan pengarsipan mengalami kesulitan dalam proses perealisasiannya, serta belum adanya

pejabat arsiparis dan belum adanya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis kearsipan menyebabkan personil kerja yang ditugaskan belum memahami aspek-aspek kearsipan yang dinilai.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi berikutnya akan dilakukan penunjukan personil kerja tambahan untuk membantu menangani kearsipan. Selain itu pengusulan keikutsertaan pegawai dalam diklat kearsipan.

IK-24: Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee

Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja.

Tabel 43. Persentase layanan perkantoran

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2024 terhadap 2024
-	-	-	-	100,00	80,00	100,00	125,00	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Tahun 2019-2022 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Layanan perkantoran tahun 2024 sebesar 100 atau tercapai 125 % dari target sebesar 80. Indikator kinerja ini mulai diakomodir pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir sehingga belum dapat dibandingkan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2024 layanan perkantoran didukung anggaran sebesar Rp 10.666.298.000 dengan realisasi Rp 10.666.023.376 atau 100 %. Anggaran mencakup belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja listrik, telepon, pemeliharaan asset. Layanan perkantoran dalam hal ini tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal, dengan demikian indikator ini juga didukung anggaran perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar Rp 100.000.000, layanan hubungan masyarakat sebesar Rp



175.188.000, layanan umum sebesar Rp 202.823.000, layanan manajemen SDM sebesar Rp 170.071.000, layanan perencanaan dan penganggaran sebesar Rp 262.969.000, layanan pemantauan dan evaluasi sebesar Rp 271.184.000, dan layanan manajemen keuangan sebesar Rp 116.086.000.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan pengidentifikasian yang mungkin menjadi penghambat pencapaian target pelayanan perkantoran.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Keterbatasan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pemberian layanan perkantoran, seperti sumber daya manusia, instrumen, dan sarana prasarana.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi berikutnya akan dilakukan adalah mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana prasana yang ada dan menyempurnakan instrumen yang ada sehingga harapannya tidak mengganggu layanan yang diberikan.

3.3. Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Peraturan tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2023, dan akan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran BPAP Ujung Batee dilakukan penghitungan oleh aplikasi SMART Kementerian Keuangan.



Gambar 23. Tangkapan layar aplikasi SMART nilai kinerja perencanaan anggaran Efisiensi anggaran sampai saat ini belum dapat dihitung karena masih menunggu penyelesaian pemetaan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk menilai efisiensi.

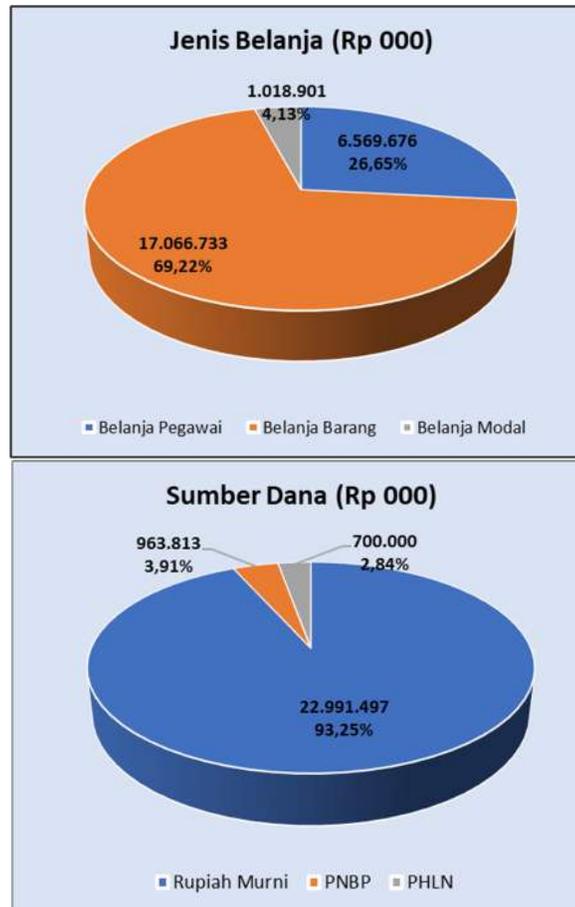
3.4. Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2024 awalnya sebesar Rp 25.249.464.000, setelah berjalannya waktu mengalami pengurangan direalokasi ke satker lain, sehingga pagu akhir sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp 24.655.310.000 dengan realisasi Rp 24.653.579.580 (99,99 %), sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 44. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2024

Kode Nama Kegiatan	Total			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
2344 Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.859.888.000	3.859.640.853	99,99	247.147
2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.234.433.000	1.234.222.089	99,98	210.911
2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	6.852.000.000	6.851.847.497	100,00	152.503
2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.964.619.000	11.963.509.721	99,99	1.109.279
5747 Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	744.370.000	744.359.420	100,00	10.580
Jumlah Pagu	24.655.310.000	24.653.579.580	99,99	1.730.420

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (2348) menjadi yang tertinggi mendapat alokasi anggaran yaitu mencapai sekitar 11 milyar rupiah. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747) sebagai terendah mendapatkan alokasi anggaran hanya sebesar sekitar 700 juta rupiah.



Gambar 24. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja tahun 2024

Belanja barang mendapatkan alokasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja modal, yaitu 69,22 % dari total anggaran. Selain itu sumber dana belanja terdiri dari Rupiah Murni sebesar 93,25 %, PNBP sebesar 3,91 %, dan ada sumber dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) mencapai 2,84 %.

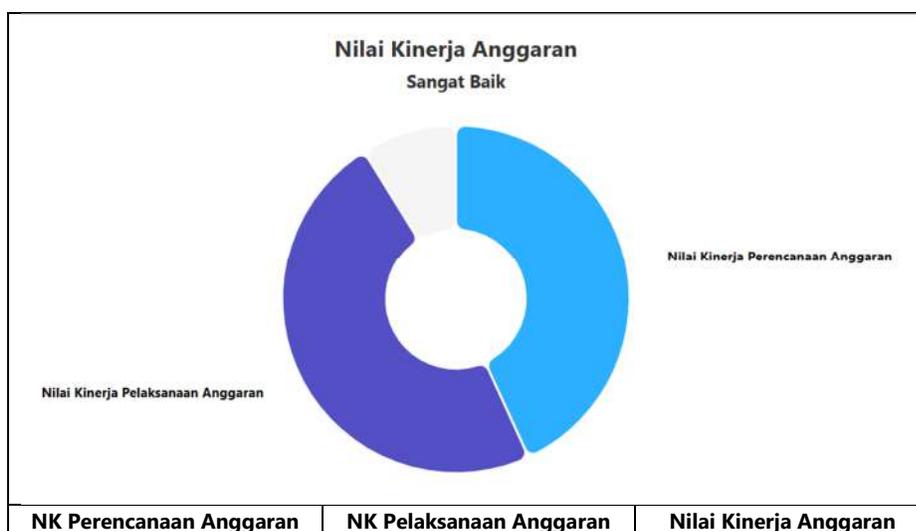


Gambar 25. Pagu anggaran tahun 2015-2024

Data *time series* 2015-2024 menunjukkan pagu anggaran setiap tahunnya mengalami naik turun. Peningkatan terbesar terjadi tahun 2023 mencapai sebesar 35,4 % dan penurunan terdalam pada tahun 2024 mencapai sebesar 30,18 %. Realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2018 hanya terserap 91,25 %, sementara realisasi tertinggi tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik karena mampu memiliki serapan tertinggi mencapai 99,99 %.

Tabel 45. Nilai aspek pembentuk IKPA tahun 2024

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	77,23	99,54	100	100	95,26	100	96,02	100%	00.00	96,02
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	11,58	19,91	10	10	9,53	25				
Nilai Aspek	88.62		98.70				100				





86,25	96,02	91,14
--------------	--------------	--------------

Gambar 26. Tangkapan layar aplikasi SMART nilai kinerja anggaran

Nilai kinerja anggaran tahun 2024 terlihat sangat baik, Dimana nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 86,25 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 96,02, sehingga nilai kinerja anggaran mencapai sebesar 91,14.



BAB 4. PENUTUP

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee merupakan salah satu unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budi daya air payau.

Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Tahun 2024 menyajikan capaian indikator kinerja selama Januari s.d Desember 2024. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan target triwulanan pada rencana aksi BPBAP Ujung Batee Tahun 2024, dari total 24 indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 22 indikator kinerja telah memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan, hanya sebanyak 2 indikator kinerja yang tidak mencapai/memenuhi target.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2024 ini antara lain dokumentasi dan pelaporan capaian kinerja belum begitu baik padahal capaian indikator tersebut sudah melampaui target.

Dalam rangka peningkatan kinerja BPBAP Ujung Batee, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di periode berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi pusat maupun instansi lain, khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja;
2. Rapat Pengendalian rutin dengan monitoring dan evaluasi pada setiap minggu pertama bulan berjalan (Januari – Desember 2025; Setiap Triwulan Tahun 2025; Setiap Semester Tahun 2025);
3. Meningkatkan kepedulian, pemahaman, dan kompetensi SDM terutama implementasi SAKIP.

LAMPRAN 1

Matriks Keselarasan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024

No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2024	Keterangan
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp 000)	1.034.278	1.167.145	1.251.476	1.376.624	1.514.286	1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah 000)	1.232.517	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
2	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	2	Percobaan pengeloaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (kawasan)	1	2	1	1	1						
3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana UPT	3	UPT perikanan budidaya yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	7	17	15	15	15	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	6	Persentase Sarana dan Prasarana Biotlok yang Disalurkan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
4	Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4	Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat (kelompok)											
		5	Prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan (unit)	7.110.000	7.683.315	8.000.000	9.000.000	10.000.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		6	Benih yang disalurkan ke masyarakat (ekor)						3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		7	Calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat (ekor)		14.820	15.000	15.000	15.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		8	Calon induk unggul yang diproduksi (ekor)	49.400	64.100	65.000	67.000	70.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		9	Pakan ikan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	100.000	70.000	72.000	75.000	77.000	2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidayaan Ikan				
		10	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)		37.000	37.000	37.000	37.000						
		11	Rehabilitasi sarana dan prasarana UPR/HSRT (unit)		3	3	3	3						
		12	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT (paket)	1	4	4	4	4						
		13	Layanan Diseminasi Teknologi PB (layanan)		5	5	5	5	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	7	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	14	Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)	3.350	3.350	3.450	3.550	3.650	4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
									5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	9	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB
											10	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB

No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2024	Keterangan
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPBAP Ujung Batee	15	Indeks profesionalisme ASN lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	72	73	74	75	76	6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di BPBAP Ujung Batee	13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		16	Penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee (%)	100	100	100	100	100			17	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		17	Nilai rekon pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee (%)	85	90	92	94	96			11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		18	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)	60	65	70	75	85			18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		19	Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	85	87	90						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (%)	88	89	90	91	92			19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,76	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	85	86	87	88	89			21	Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	86	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa (%)		72.5	75	75	75			22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		23	Tingkat pengelolaan barang milik negara (%)		72.5	75	75	75			20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											12	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											14	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											16	Persentase Pemberitaan Netral dan Tertinggi Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											23	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											24	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB

LAMPIRAN 2

Matriks Perubahan Indikator Kinerja 2024

PERJANJIAN KINERJA AWAL				PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN					
NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	NO IK	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	NO IK	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET
1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah 000)	1.232.517	1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah 000)	1.232.517
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidayaan Ikan	2	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80	2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidayaan Ikan	2	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	6	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	6	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	7	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	7	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100	4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		9	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100			9	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	10	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100	5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	10	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di BPBAP Ujung Batee	11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82	6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di BPBAP Ujung Batee	11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82
		12	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91			12	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
		13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85			13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85
		14	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4			14	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76			15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		16	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86			16	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86
		17	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100			17	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
		18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	80			18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
		19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,76			19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,76
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	80			20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
		21	Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	86			21	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	71
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80			22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
		23	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75			23	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
		24	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	80			24	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	80

LAMPIRAN 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Manijo**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya
Air Payau Ujung Batee

Manijo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

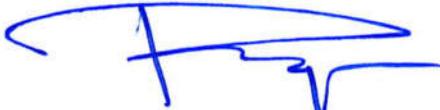
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di BPBAP Ujung Batee	1.	Nilai PNBP Yang Diperoleh (Rupiah)	1.232.517.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan untuk Pembudidaya Ikan	2.	Persentase Pakan Mandiri Yang Diproduksi (Persen)	80
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		6.	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8.	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		9.	Persentase Pengujian Antimicrobial Resistance (Persen)	100
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	10.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82
		12.	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85
	14. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
	15. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
	16. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86
	17. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
	19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,76
	20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
	21. Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	86
	22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		23. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
		24. Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	80

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya
Air Payau Ujung Batee



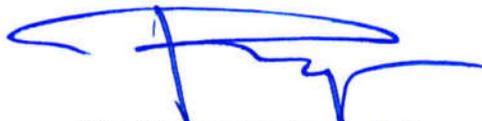
Manijo

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.859.888.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.234.433.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	7.575.000.000
4.	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	744.370.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	11.835.773.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee Tahun 2024		25.249.464.000

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya
Air Payau Ujung Batee


Manijo

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditiன்ப@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Manijo**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya
Air Payau Ujung Batee

Manijo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di BPBAP Ujung Batee	1.	Nilai PNBP Yang Diperoleh (Rupiah)	1.232.517.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan untuk Pembudidaya Ikan	2.	Persentase Pakan Mandiri Yang Diproduksi (Persen)	80
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		6.	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8.	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		9.	Persentase Pengujian Antimicrobial Resistance (Persen)	100
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	10.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82
		12.	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85
		14. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		15. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		16. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86
		17. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
		18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
		19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,76
		20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
		21. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	71
		22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		23. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
		24. Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	80

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya
Air Payau Ujung Batee



Manijo

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.859.888.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.234.433.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	6.852.000.000
4.	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	744.370.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	11.818.493.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee Tahun 2024		24.509.184.000

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya
Air Payau Ujung Batee



Manijo

LAMPIRAN 4 : Realisasi Anggaran

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA		24.655.310.000	0	22.071.643.681	2.581.935.899	24.653.579.580	99,99 %	1.730.420
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	12.690.691.000	0	11.372.786.185	1.317.283.674	12.690.069.859	100,00 %	621.141
HB.2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.859.888.000	0	3.500.524.402	359.116.451	3.859.640.853	99,99 %	247.147
	QEL Bantuan Hewan	1.195.691.000	0	1.039.361.237	156.237.834	1.195.599.071	99,99 %	91.929
	QEL.U02 Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	43.450.000	0	33.954.380	9.495.600	43.449.980	100,00 %	20
	QEL.U07 Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	360.632.000	0	327.778.832	32.812.235	360.591.067	99,99 %	40.933
	QEL.U08 Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	181.210.000	0	133.571.529	47.630.459	181.201.988	100,00 %	8.012
	QEL.U10 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	610.399.000	0	544.056.496	66.299.540	610.356.036	99,99 %	42.964
	RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2.664.197.000	0	2.461.163.165	202.878.617	2.664.041.782	99,99 %	155.218
	RAL.001 Calon Induk Unggul yang diproduksi	2.664.197.000	0	2.461.163.165	202.878.617	2.664.041.782	99,99 %	155.218
HB.2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.234.433.000	0	915.346.785	318.875.304	1.234.222.089	99,98 %	210.911
	BJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	428.358.000	0	421.883.171	6.430.600	428.313.771	99,99 %	44.229
	BJC.U02 Sampel Kualitas Air Layanan UPT	206.919.000	0	206.362.022	556.000	206.918.022	100,00 %	978
	BJC.U04 Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	91.059.000	0	88.831.574	2.197.000	91.028.574	99,97 %	30.426
	BJC.U05 Sampel Biologi Molekuler Layanan UPT	130.380.000	0	126.689.575	3.677.600	130.367.175	99,99 %	12.825
	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	31.075.000	0	22.793.680	8.266.840	31.060.520	99,95 %	14.480
	QJC.U03 Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) yang diuji	31.075.000	0	22.793.680	8.266.840	31.060.520	99,95 %	14.480
	RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	75.000.000	0	36.417.066	38.581.300	74.998.366	100,00 %	1.634
	RAL.001 Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	75.000.000	0	36.417.066	38.581.300	74.998.366	100,00 %	1.634
	RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	700.000.000	0	434.252.868	265.596.564	699.849.432	99,98 %	150.568
	RBQ.003 Infrastruktur budidaya udang yang di tingkatkan - IISAP	700.000.000	0	434.252.868	265.596.564	699.849.432	99,98 %	150.568
HB.2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	6.852.000.000	0	6.421.883.198	429.964.299	6.851.847.497	100,00 %	152.503
	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	300.000.000	0	299.958.601	0	299.958.601	99,99 %	41.399
	AEF.001 Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budidaya	300.000.000	0	299.958.601	0	299.958.601	99,99 %	41.399
	AEG Konferensi dan Event	180.000.000	0	179.342.896	547.000	179.889.896	99,94 %	110.104
	AEG.001 Konferensi dan Event Perikanan Budidaya	180.000.000	0	179.342.896	547.000	179.889.896	99,94 %	110.104
	QEG Bantuan Peralatan / Sarana	6.372.000.000	0	5.942.581.701	429.417.299	6.371.999.000	100,00 %	1.000
	QEG.001 Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	6.372.000.000	0	5.942.581.701	429.417.299	6.371.999.000	100,00 %	1.000
HB.5747	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	744.370.000	0	535.031.800	209.327.620	744.359.420	100,00 %	10.580
	BJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	5.938.000	0	2.086.800	3.850.320	5.937.120	99,99 %	880
	BJC.U01 Sampel Nutrisi Pakan	5.938.000	0	2.086.800	3.850.320	5.937.120	99,99 %	880
	RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	738.432.000	0	532.945.000	205.477.300	738.422.300	100,00 %	9.700
	RAL.001 Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	738.432.000	0	532.945.000	205.477.300	738.422.300	100,00 %	9.700
WA	Program Dukungan Manajemen	11.964.619.000	0	10.698.857.496	1.264.652.225	11.963.509.721	99,99 %	1.109.279
WA.2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.964.619.000	0	10.698.857.496	1.264.652.225	11.963.509.721	99,99 %	1.109.279
	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100.000.000	0	99.510.499	0	99.510.499	99,51 %	489.501
	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100.000.000	0	99.510.499	0	99.510.499	99,51 %	489.501
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.044.309.000	0	9.803.879.952	1.239.940.960	11.043.820.912	100,00 %	488.088
	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	175.188.000	0	174.985.199	164.000	175.149.199	99,98 %	38.801
	EBA.962 Layanan Umum	202.823.000	0	197.865.347	4.782.990	202.648.337	99,91 %	174.663
	EBA.994 Layanan Perkantoran	10.666.298.000	0	9.431.029.406	1.234.993.970	10.666.023.376	100,00 %	274.624
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	170.071.000	0	146.602.788	23.466.560	170.069.348	100,00 %	1.652
	EBC.001 Layanan Manajemen SDM	170.071.000	0	146.602.788	23.466.560	170.069.348	100,00 %	1.652
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	650.239.000	0	648.864.257	1.244.705	650.108.962	99,98 %	130.038
	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	262.969.000	0	262.306.710	661.000	262.967.710	100,00 %	1.290
	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	271.184.000	0	270.685.933	404.000	271.089.933	99,97 %	94.067
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	116.086.000	0	115.871.614	179.705	116.051.319	99,97 %	34.681

Aquaculture is future



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Jalan Laksamana Malahayati Km. 16 Ujung Batee, Masjid Raya, Kab Aceh Besar, Prov Aceh

Telepon : 08116811448 | email : tu.bbapub@gmail.com

<https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee>